



Direktorat Perlindungan Perkebunan
Direktorat Jenderal Perkebunan
Kementerian Pertanian



LAPORAN KINERJA 2022

DIREKTORAT PERLINDUNGAN
PERKEBUNAN

LAKIN 2022

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan taufik-Nya kepada kita sekalian, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2022 dapat terselesaikan.

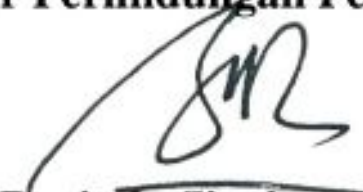
Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2022 disusun dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban Direktorat Perlindungan Perkebunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

Beberapa aturan yang mendasari Laporan Kinerja yaitu Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Materi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2022 ini merupakan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi (Tusi) Direktorat Perlindungan Perkebunan secara garis besar.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan dan pihak terkait lainnya yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya, sehingga tugas-tugas yang dibebankan kepada Direktorat Perlindungan Perkebunan dapat diselesaikan dengan baik seperti tertuang pada Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan.

Kiranya laporan ini dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai acuan untuk kelanjutan kegiatan di masa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2023
Direktur Perlindungan Perkebunan



Ir. Baginda Siagian, M.St.
NIP. 196810092001121001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Sebagai penjabaran tugas dan fungsi Direktorat Perlindungan Perkebunan, serta memperhatikan perubahan lingkungan strategis domestik maupun internasional serta Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan 2020-2024 Revisi II, maka dirumuskan Sasaran Program yang ingin dicapai oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan perkebunan tahun 2020-2024 adalah Terkendalinya Penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada Tanaman Perkebunan; serta Terwujudnya Pengelolaan Manajemen Ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan Yang Efektif, Efisien Dan Akuntabel.

Pengukuran kinerja tahun 2022 untuk kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan (1779) diperoleh capaian realisasi keuangan sebesar 98,87% dan fisik 100%. Adapun pengukuran kinerja lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan (Pusat) tahun 2022, realisasi keuangan sebesar 98,80% dengan capaian fisik 100%, sedangkan untuk kegiatan daerah yang tersebar di 32 provinsi realisasi keuangan sebesar 99,10% dengan capaian fisik sebesar 100%.

Kinerja Berdasarkan PK tahun 2022, sebagai berikut:

1. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT yang dilaporkan tahun 2022 mencapai 58,09% atau 129,09% dari target yang direncanakan yaitu 45%.
2. Rasio luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan DPI terhadap luas areal perkebunan yang berpotensi terdampak dengan target 40%, pada tahun 2022 tercapai 40,06% atau 100,15% dari target.
3. Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2022 dengan target 3,5 pada skala Likert tercapai 3,52 atau 100,57% dari target.

Hasil analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya untuk kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 22 tahun 2021 maka kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan diperoleh Nilai Efisiensi (NE) 53,29% dan Efisiensi (E) 1,32 yang menunjukkan kegiatan terlaksana dengan efisien.

Pelaksanaan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan tidak terlepas dari permasalahan, hambatan dan kendala, namun dengan upaya percepatan dan penanganan serta langkah-langkah strategis permasalahan tersebut dapat diminimalisir dampaknya bagi pembangunan perkebunan.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Organisasi.....	1
1.3. Strategi	4
1.4. Isu Strategis.....	4
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1. Perencanaan Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2020-2024	5
2.1.1. Visi	6
2.1.2. Misi.....	6
2.1.3. Tujuan.....	7
2.2 Perjanjian Kinerja	7
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	8
3.1. Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan	8
3.1.1. Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tahun 2022.....	8
3.1.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2022 Terhadap Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya.....	11
3.1.3. Capaian Kinerja Terhadap Target Jangka Menengah pada Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan	13
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan	15
3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	17
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	19
3.2. Realisasi Anggaran	21
3.2.1. Akuntabilitas Terhadap Target Serapan Direktorat Perlindungan Perkebunan.....	21
3.2.2. Akuntabilitas Terhadap Capaian Fisik Direktorat Perlindungan Perkebunan	21
BAB IV. PENUTUP	24
4.1. Kesimpulan	24
4.2. Saran.....	25
LAMPIRAN	26

DAFTAR TABEL

No.	Teks	Halaman
1	Target Direktorat Perlindungan Perkebunan 2020-2024 sesuai Indikator Kegiatan Utama	5
2	PK Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2022	7
3	Capaian Kinerja Penguatan Perlindungan Perkebunan tahun 2022 terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan	8
4	Capaian Kinerja Penguatan Perlindungan Perkebunan tahun 2022 terhadap Tahun lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya	12
5	Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Berdasarkan target Renstra 2020 – 2024 (Revisi II) sampai dengan Tahun 2022	13
6	Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2022	17
7	Nilai Efisiensi Penguatan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Lada	18
8	Nilai Efisiensi Penguatan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kopi	18
9	Nilai Efisiensi Penguatan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kakao	18
10	Nilai Efisiensi Penguatan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Cengkeh	18
11	Nilai Efisiensi Penguatan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Karet	18
12	Nilai Efisiensi Penguatan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Jambu Mete	19
13	Nilai Efisiensi Penguatan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kelapa Sawit	19
14	Nilai Efisiensi Penguatan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kelapa	19
15	Nilai Efisiensi Penguatan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Tebu	19
16	Nilai Efisiensi Area Penanganan OPT Perkebunan	20
17	Nilai Efisiensi Area Penanganan DPI dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	20
18	Nilai Efisiensi Perangkat Perlindungan Perkebunan	20
19	Capaian Serapan Keuangan dan Fisik Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan Pusat, Daerah dan UPT Pusat	22

DAFTAR GAMBAR

No.	Teks	Halaman
1	Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan	3



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form e-PK Tahun 2022
- Lampiran 2 : Rekapitulasi Pengendalian OPT Tahun 2022
- Lampiran 3 : Rekapitulasi Penanganan DPIPK Tahun 2022
- Lampiran 4 : Realisasi Keuangan Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan Pusat, UPT Pusat dan Daerah Tahun 2022
- Lampiran 5 : Laporan Survei Kepuasan Pegawai Lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2022
- Lampiran 6 : Formula Pengukuran Nilai Efisiensi dan Efisiensi
- Lampiran 7 : Realisasi Keuangan Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan Pusat dan Daerah Tahun 2022
- Lampiran 8 : Realisasi Keuangan Penguatan Perlindungan Perkebunan di Pusat Tahun 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah maka diperlukan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengiktisarian, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut dalam penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Tugas Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan.

Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas direktorat dan arahan dalam pengembangan perlindungan perkebunan adalah Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2020-2024 Revisi II. Visi Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah **“Perlindungan Perkebunan terhadap risiko kerugian akibat OPT dan non OPT berbasis Inovasi, Digitalisasi dan Modernisasi untuk mendukung tercapainya visi Direktorat Jenderal Perkebunan”**.

Sasaran Direktorat Perlindungan Perkebunan sebagaimana tertuang dalam Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2020-2024 Revisi II yaitu:

1. Terkendalnya Penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada Tanaman Perkebunan.
2. Terwujudnya Pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel.

1.2. Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian telah ditetapkan bahwa unit kerja Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan terdiri dari 6 (enam) unit yaitu: Sekretariat Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Perbenihan Perkebunan, Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah, Direktorat Tanaman

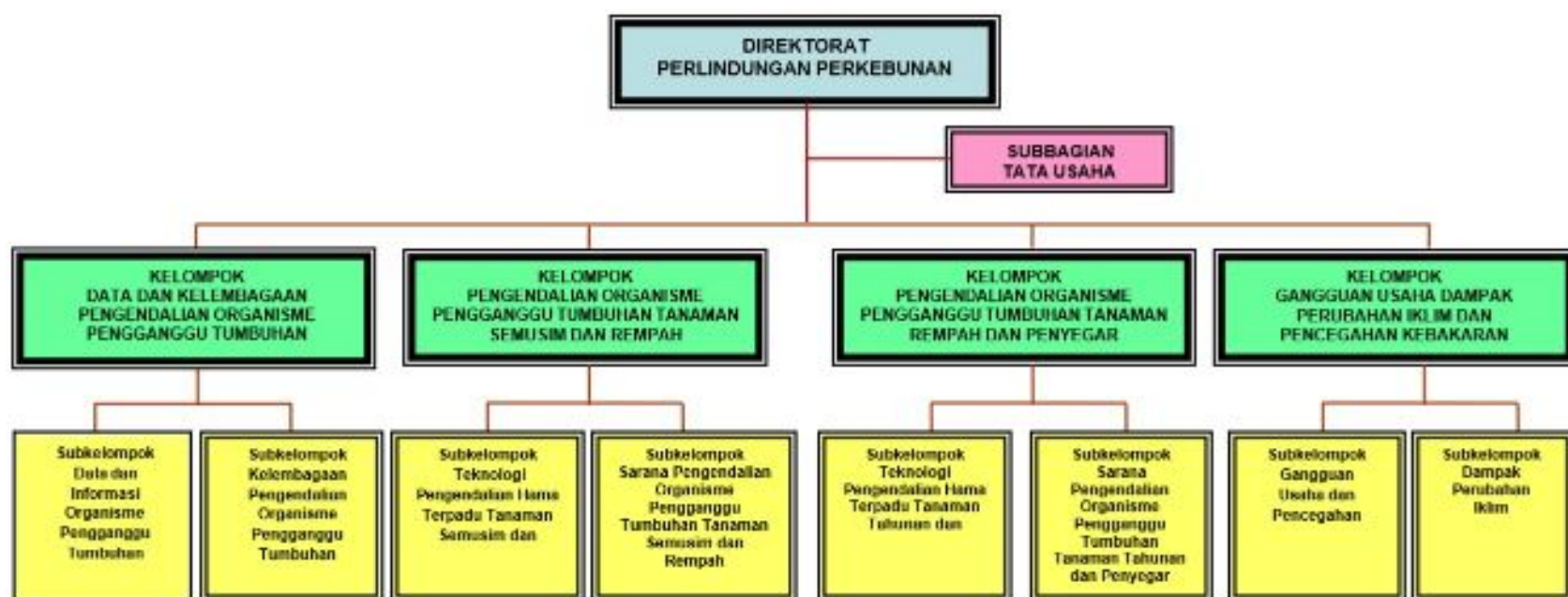
Tahunan dan Penyegar, Direktorat Perlindungan Perkebunan serta Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, tugas Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah “melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian hama penyakit dan perlindungan perkebunan”.

Dalam melaksanakan tugas di atas, Direktorat Perlindungan Perkebunan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu tumbuhan;
2. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan;
3. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
4. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah, tanaman tahunan dan penyegar, serta penanggulangan gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran; dan
8. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No 8 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian, Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan terdiri atas 4 Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu juga terdapat jabatan struktural Subbagian Tata Usaha. Jumlah pegawai di Direktorat Perlindungan Perkebunan terdiri atas 52 PNS dan 2 orang honorer, dengan jumlah yang berpendidikan SMA sebanyak 6 orang, D3 sebanyak 3 orang, Sarjana (S1) 28 orang, dan pasca sarjana (S2) sebanyak 17 orang.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Perlindungan Perkebunan

Adapun susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan;
2. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah;
3. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar;
4. Kelompok Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran;
5. Subbagian Tata Usaha.

Tugas masing-masing Kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan
Tugas: melakukan pengelolaan data organisme pengganggu tumbuhan, dan penyiapan peningkatan kapasitas kelembagaan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.
2. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim dan Rempah
Tugas: melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman semusim dan rempah.
3. Kelompok Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan dan Penyegar
Tugas: melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman tahunan dan penyegar.

4. Kelompok Gangguan Usaha, Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran;
Tugas: melakukan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang gangguan usaha, dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran.
5. Subbagian Tata Usaha; dan
Tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, persuratan, dan kearsipan Direktorat Perlindungan Perkebunan

1.3. Strategi

Dalam rangka mendukung strategi Direktorat Jenderal Perkebunan yang salah satunya adalah “Perlindungan tanaman perkebunan dari OPT/ DPI secara optimal” maka strategi Direktorat Perlindungan perkebunan adalah:

1. Perlindungan Perkebunan Berbasis Inovasi, Digitalisasi dan Modernisasi (Si3)
2. Mitigasi resiko kehilangan hasil akibat serangan OPT dan dampak perubahan iklim serta gangguan usaha perkebunan
3. Peningkatan kemampuan SDM pertanian dalam penerapan teknologi perlindungan, identifikasi dan pengendalian opt, mitigasi dan adaptasi bencana
4. Mendorong upaya pemberdayaan perangkat perlindungan dalam penanganan OPT;
5. Penyediaan Standar Pelayanan Minimum Perlindungan Perkebunan dalam identifikasi dan pengendalian OPT, penanganan kebakaran lahan dan kebun serta gangguan usaha perkebunan
6. Pelaksanaan Perkebunan berkelanjutan dan komoditas perkebunan yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi

1.4. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang termasuk ke dalam ruang lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan, antara lain:

1. Serangan OPT pada tanaman perkebunan yang dapat menurunkan produksi.
2. Penolakan ekspor komoditas perkebunan akibat cemaran residu pestisida.
3. Kebakaran lahan dan hutan.
4. Pemanasan global dan peningkatan emisi karbon.
5. Konflik dan Gangguan Usaha Perkebunan.
6. Sumber Daya Manusia Perlindungan Perkebunan yang terbatas jumlahnya.
7. Diseminasi teknologi perlindungan perkebunan masih kurang.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2020-2024

Indikator Kegiatan Utama Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2020 - 2024 sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2020-2024 Revisi II, sebagai berikut:

Tabel 1. Target Direktorat Perlindungan Perkebunan 2020-2024 Sesuai Indikator Kegiatan Utama

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
SK. 1: Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	1 Rasio Serangan OPT Perkebunan yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT Tanaman Perkebunan	%	80	45	45	45	45
	Jumlah Serangan OPT pada Tanaman Semusim dan Rempah yang Ditangani	Ha	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Luas Lahan Terdampak OPT yang Difasilitasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Semusim dan Rempah	Ha	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Luas Lahan Terdampak OPT yang Difasilitasi Sarana Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah	Ha	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Jumlah Serangan OPT pada Tanaman Tahunan dan Penyegar yang Ditangani	Ha	530.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Luas Lahan Terdampak OPT yang Difasilitasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Tahunan dan Penyegar	Ha	530.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Luas Lahan Terdampak OPT yang Difasilitasi Sarana Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar	Ha	530.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)	Satuan	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024
	2 Rasio Luas Area Perkebunan yang Ditangani Dibandingkan Area Terkena DPI	%	40	40	40	40	40
	Jumlah Risiko DPI Tanaman Perkebunan yang Berhasil Dimitigasi	Ha	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	Jumlah Risiko Kebakaran yang Dimitigasi	Ha	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
	Jumlah Risiko Gangguan Usaha yang Dimitigasi	Kasus	21	21	21	21	21
	Jumlah Risiko DPI yang Dimitigasi	Ha	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	3 Jumlah Layanan Publik Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT	Layanan	8	9	9	9	9
	Jumlah Layanan Publik Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT	Layanan	8	9	9	9	9
	Jumlah Layanan Publik Data dan Informasi OPT	Layanan	3	3	3	3	3
	Jumlah Layanan Publik Kelembagaan Pengendalian OPT	Layanan	5	6	6	6	6
SK2: Terwujudnya Pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel	1 Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan	Skala Likert (1-4)	-	3.5	3.5	3.5	3.5

2.1.1. Visi

Visi Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah “Perlindungan Perkebunan terhadap risiko kerugian akibat OPT dan non OPT berbasis Inovasi, Digitalisasi dan Modernisasi untuk mendukung tercapainya visi Direktorat Jenderal Perkebunan.

2.1.2. Misi

Misi Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sistem perlindungan perkebunan dan penanganan dampak perubahan iklim serta gangguan usaha yang terpadu terintegrasi dan berkelanjutan;
2. Mengurangi Kehilangan Hasil Produksi Perkebunan
3. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang perlindungan perkebunan.

2.1.3. Tujuan

Tujuan Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah:

1. Menurunkan risiko kerugian hasil produksi perkebunan akibat serangan OPT, dampak perubahan iklim dan gangguan usaha perkebunan;
2. Melakukan pembinaan, bimbingan dan pendampingan kepada pekebun dan SDM Perlindungan dalam menerapkan inovasi dan teknologi perlindungan perkebunan, pengamatan dan pengendalian OPT, pencegahan kebakaran lahan dan kebun, penanganan DPI dan gangguan usaha perkebunan;
3. Fasilitasi kegiatan pemberdayaan perangkat, pengamatan dan kelembagaan kelompok tani perlindungan perkebunan (KTPA, PPHT, Regu Pengendali Hama dan Desa Pertanian Organik) yang modern.
4. Mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas di bidang perlindungan perkebunan.

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/penetapan kinerja antara atasan dengan bawahan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja pembangunan dari sumber daya yang tersedia melalui target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya berupa hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*).

Penetapan Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan dibuat melalui SAKIP Kementerian Pertanian/sakip.pertanian.go.id (**Tabel 2.**). Pada tahun 2022, Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan yang telah disusun pada bulan Desember 2021 mengalami perubahan pada bulan Februari, Mei, Juli, Agustus, dan Desember 2022. Alokasi anggaran Direktorat Perlindungan Perkebunan sesuai dengan revisi PK terakhir pada bulan Desember 2022 yaitu sebesar Rp. 76.948.382.000,- dan telah diupload di SAKIP Kementerian Pertanian (**Lampiran 1**).

Tabel 2. PK Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2022

No.	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1.	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	1-1	Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	45,00%
		1-2	Rasio luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40,00%
		1-3	Jumlah layanan publik data dan kelembagaan pengendalian OPT	9,00 layanan
2.	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel	2-1	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan	3,50 Skala <i>Likert</i>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan

3.1.1. Pencapaian Kinerja Terhadap Target Kinerja Tahun 2022

Capaian kinerja kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan tahun 2022 terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2022 disajikan pada **Tabel 3**.

Tabel 3. Capaian Kinerja Penguatan Perlindungan Perkebunan tahun 2022 terhadap Perjanjian Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	45,00%	58,09%	129,09%
	Rasio luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40,00%	40,06%	100,15%
	Jumlah layanan publik data dan kelembagaan pengendalian OPT	9,00 layanan	9,00 layanan	100%
Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan	3,50 Skala Likert	3,52 Skala Likert	100,57%

Rincian capaian kinerja terhadap target kinerja diuraikan sebagai berikut:

1. Rasio luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan OPT terhadap Luas Serangan OPT yang dilaporkan dengan target 45,00% terealisasi sebesar 58,09% atau tercapai 129,09%. Rasio didapatkan dari luas pengendalian yang dilakukan pada tahun 2022 yaitu seluas 306.926 Ha dibandingkan dengan laporan luas serangan OPT yaitu 528.339 Ha. Data luas serangan dan pengendalian OPT bersumber dari laporan daerah ke Pusat dan **aplikasi Sistem Pelaporan dan Rekapitulasi Data OPT berbasis daring (Sipereda OPT)** baik yang bersumber dari APBN, APBD maupun masyarakat, data sepertipada **Lampiran 2**. Untuk kegiatan di Direktorat Perlindungan Perkebunan (APBN) pengendalian OPT dilakukan pada areal seluas 11.631 Ha yang terdiri dari Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar seluas 5.156 Ha serta

Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah seluas 6.475 Ha dan terealisasi 100 % atau capaian 100%.

Cara penghitungan Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan menggunakan rumus seperti di bawah ini:

$$A: \frac{\text{total luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan OPT}}{\text{Total Luas Serangan OPT yang dilaporkan}} \times 100\%$$

2. Rasio luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan DPI terhadap luas areal perkebunan yang berpotensi terdampak dengan target 40,00% tercapai 40,06% atau tercapai 100,15%.

Rasio tersebut diperoleh dari jumlah risiko DPI tanaman yang berhasil dimitigasi seluas 701 Ha dibandingkan dengan tanaman perkebunan yang berpotensi terdampak DPI seluas 1.750 Ha. Rekapitulasi Data penanganan DPI Tahun 2022 seperti pada **Lampiran 3**.

Cara penghitungan Rasio luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI menggunakan rumus seperti di bawah ini:

$$B: \frac{\text{total luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan DPI}}{\text{total luas areal perkebunan yang berpotensi terdampak}} \times 100\%$$

3. Jumlah layanan publik data dan kelembagaan pengendalian OPT tahun 2022 dengan target 9 layanan tercapai 9 Layanan atau 100%. Layanan tersebut adalah:

- a. Layanan penyajian data serangan OPT (komoditas).

Layanan penyajian data serangan OPT melalui Aplikasi **Sistem Pelaporan dan Rekapitulasi Data OPT berbasis daring (Sipereda OPT)** merupakan aplikasi yang digunakan oleh petugas provinsi dan kabupaten untuk melaporkan/menginput data serangan dan pengendalian OPT sehingga dapat dikompilasi dan diakses datanya di Pusat. Data Informasi Serangan dan Pengendalian tersebut dapat disampaikan kepada pihak internal maupun eksternal untuk digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan.

- b. Layanan informasi OPT (komoditas).

Layanan berupa aplikasi **Sistem Informasi Konsultasi Kesehatan Tanaman Perkebunan (Sinta)** yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan akses mendiagnosis Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 15 komoditi utama Perkebunan (teh, cengkeh, sagu, lada, nilam, kapas, pala, tembakau, kelapa, karet, kelapa sawit, jambu mete, kakao, kopi dan tebu) secara daring berikut cara

pengendaliannya. Pada aplikasi ini juga tersedia ruang tanya jawab/live chat terkait OPT.

- c. Layanan informasi sistem informasi organik perkebunan (komoditas).

Layanan informasi berupa aplikasi **Sistem Informasi Desa Organik Berbasis Komoditas Perkebunan (Sindo)** dikembangkan untuk memberikan layanan yang lebih luas tentang pertanian organik, dilengkapi dengan layanan konsultasi online (live chat). Layanan ini juga terintegrasi dengan layanan Sinta.

- d. Layanan bimtek

Layanan berupa fasilitasi bimtek untuk peningkatan kapabilitas Petugas/pegawai dalam Pemanfaatan Aplikasi Power Bussines Intelligence (BI), yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh Microsoft yang memiliki fungsi untuk mengolah dan menampilkan data dengan visualisasi data yang interaktif.

- e. Layanan Operasional LUPH

Layanan berupa fasilitasi standar pelayanan minimum berupa sarana atau prasarana untuk Laboratorium Utama Pengendali Hayati untuk pembuatan dan perbanyakan APH, eksplorasi dan inventarisasi APH. Tahun 2022 Fasilitasi tersebut diberikan kepada 3 unit LUPH di 3 Provinsi (lokasi seperti pada Lampiran 4).

- f. Layanan Operasional LL

Layanan berupa fasilitasi standar pelayanan minimum untuk Laboratorium Lapangan berupa sarana atau prasarana untuk pembuatan bahan pengendali OPT (stater APH), pelatihan perbanyakan dan penyebaran APH bagi petani. Tahun 2022 Fasilitasi tersebut diberikan kepada 27 unit LL di 26 Provinsi (lokasi seperti pada Lampiran 4).

- g. Layanan Kelembagaan Desa Organik.

Layanan berupa fasilitasi pembentukan Desa Organik, termasuk bimbingan kepada petugas pendamping sampai mendapatkan sertifikat dan surveilens. Tahun 2022 Fasilitasi diberikan kepada 48 Desa di 11 provinsi (lokasi seperti pada Lampiran 4).

- h. Layanan Operasional Brigade Proteksi Tanaman

Layanan berupa fasilitasi Standar Pelayanan Minimum bagi Brigade Proteksi Tanaman (BPT) dan Regu pengendali OPT (RPO) seperti Bahan Pengendali OPT sebagai *buffer stock* yang digunakan untuk penanganan serangan OPT pada situasi eksplosif, pada sumber-sumber serangan yang berpotensi menimbulkan eksplosif dan daerah endemis dengan intensitas serangan berat dan fasilitasi pembayaran insentif bagi BPT dan RPO. Tahun 2022 Fasilitasi yang diberikan sebanyak 31 unit di 31 provinsi (lokasi seperti pada Lampiran 4).

i. Pemberdayaan Pengamat OPT Perkebunan

Pemberdayaan Pengamat dengan fasilitasi pembayaran insentif bagi petugas pengamat OPT. Tahun 2022 Fasilitasi tersebut diberikan kepada 1.139 orang petugas pengamat OPT di 29 provinsi (lokasi seperti pada Lampiran 4).

4. Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2022 dengan target 3,50 pada skala Likert tercapai 3,52 atau 100,57% dengan kriteria sangat berhasil.

Survei Kepuasan menggunakan alat bantu berupa kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan yang dibagikan kepada pegawai lingkup ditlinbun pengguna layanan sebagai responden secara langsung. Dalam melakukan survey secara periodik dipergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala *likert*. Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia. Survei IKM ini terdiri dari pertanyaan kuesioner meliputi 10 (sepuluh) unsur, yaitu:

- a. Keramahan dan kepedulian pelayanan
- b. Kecepatan waktu pelayanan
- c. Kenyamanan pelayanan
- d. Penampilan/kerapihan pelayanan pelayanan
- e. Kualitas pelayanan
- f. Kepuasan terhadap informasi yang diberikan
- g. Pelayanan sarana dan prasarana
- h. Pelayanan kepegawaian
- i. Pelayanan keuangan
- j. Profesionalisme pelayanan

Laporan Hasil IKM seperti pada **Lampiran 5**.

3.1.2. Pencapaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Kinerja Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya

Sejak tahun 2021, Direktorat Perlindungan Perkebunan memiliki penambahan Indikator Kinerja baru sesuai dengan Renstra 2020-2024 Revisi II. Indikator Kinerja pada tahun 2020 masih mengacu pada Renstra 2020-2024 Revisi I. Capaian kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2022 terhadap tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya disajikan pada **Tabel 4**. Capaian kinerja kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2022 terhadap capaian tahun 2020 dan 2021 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 4. Capaian Kinerja Penguatan Perlindungan Perkebunan tahun 2022 terhadap Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)/Indikator Kinerja Aktivitas (IKA) 2020	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK)/Indikator Kinerja Aktivitas (IKA) 2021-2022	Kinerja Tahun									Capaian Kinerja 2022 terhadap tahun (%)	
		Renstra 2020-2024 Revisi I			Renstra 2020-2024 Revisi II							
		2020			2021			2022				
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	2020	2021
Rasio Serangan OPT Perkebunan yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT tanaman perkebunan (%)	Rasio Serangan OPT Perkebunan yang Ditangani terhadap Luas Serangan OPT tanaman perkebunan (%)	80	35,57	44,46	45	44,96	99,91	45	58,09	129,09	290,35	129,21
1. Jumlah Serangan OPT pada Tanaman Tahunan dan Penyegar yang Ditangani (ha)	1. Jumlah Serangan OPT pada Tanaman Tahunan dan Penyegar yang Ditangani (ha)	530.000	176.428	33,28	230.000	230.500	100,22	230.000	293.974	127,81	384,06	127,53
2. Jumlah Serangan OPT pada Tanaman Semusim dan Rempah yang Ditangani (ha)	2. Jumlah Serangan OPT pada Tanaman Semusim dan Rempah yang Ditangani (ha)	27.000	17.080	63,26	15.000	14.259	95,06	15.000	12.952	86,34	136,49	90,83
Rasio Luas Area Perkebunan yang Ditangani Dibandingkan Area Terkena DPI (%)	Rasio Luas Area Perkebunan yang Ditangani Dibandingkan Area Terkena DPI (%)	40	39,44	98,61	40	40	100	40	40,06	100,15	101,56	100,15
Jumlah risiko DPI tanaman perkebunan yang berhasil dimitigasi (ha)	Jumlah risiko DPI tanaman perkebunan yang berhasil dimitigasi (ha)	1080	1065	98,61	1.080	1.080	100	1.080	701	64,91	65,82	64,91
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik perlindungan perkebunan (skala likert)	Jumlah layanan publik data dan kelembagaan pengendalian OPT (layanan)	3	3,15	105	9	9	100	9	9	100	-	100
Jumlah layanan publik data dan kelembagaan pengendalian OPT (layanan)	Jumlah layanan publik data dan kelembagaan pengendalian OPT (layanan)	8	8	100	9	9	100	9	9	100	100	100
	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan (skala Likert)	-	-	-	3,5	3,51	100,28	3,5	3,52	100,57	-	100,29

1. Capaian kinerja rasio luas serangan OPT yang dikendalikan dibanding luas serangan OPT perkebunan yang dilaporkan tahun 2022 jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2021 meningkat dengan realisasi 58,09%, capaian 129,09% atau mengalami peningkatan sebesar 129,21%. Sedangkan jika dibandingkan dengan tahun 2020, maka capaian tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 290,35%. Peningkatan yang signifikan tersebut dikarenakan terjadi perubahan target sejak tahun 2021 sesuai dengan Renstra Revisi II. Pada tahun 2020, target masih menggunakan Renstra

Revisi I. Capaian kinerja kegiatan pendukung berupa Jumlah Serangan OPT pada Tanaman Tahunan dan Penyegar yang Ditangani serta Jumlah Serangan OPT pada Tanaman Semusim dan Rempah yang Ditangani tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 berturut – turut yaitu sebesar 127,53% dan 90,83%. Meskipun luasan pengendalian pada tanaman semusim dan rempah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2021, namun secara keseluruhan areal pengendalian OPT tetap di atas target.

2. Capaian kinerja Rasio Luas Area Perkebunan yang Ditangani Dibandingkan Area Terkena DPI tahun 2022 jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2020 dan 2021 mengalami peningkatan masing – masing sebesar 101,56% dan 100,15%.
3. Kinerja IKSJ Jumlah layanan publik data dan kelembagaan pengendalian OPT (layanan) pada tahun 2022 sama dengan kinerja pada tahun 2021 yaitu sebesar 100%. Kinerja tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020, karena berbeda satuan pengukuran. Pada tahun 2020 satuan pengukuran berupa skala Likert, sedangkan sejak tahun 2021, satuan pengukuran berupa volume jumlah layanan.
4. IKSJ Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan (skala Likert) pada tahun 2022 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2021 yaitu sebesar 100,29%. Kinerja pada tahun 2022 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2020, karena IKSJ ini baru ada pada tahun 2021 sesuai dengan Renstra Revisi II.

3.1.3. Capaian Kinerja terhadap Target Jangka Menengah pada Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan

Pencapaian kinerja tahun 2022 jika dibandingkan terhadap sasaran Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan Tahun 2020 – 2024 (Revisi II) ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 5. Capaian Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan Berdasarkan Target Renstra 2020-2024 (Revisi II) sampai dengan Tahun 2022

Indikator Kinerja sasaran Kegiatan		Akumulasi 2020-2024	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
A.	Target Renstra						
	Rasio Serangan OPT Perkebunan yang Ditangani terhadap Luas Serangan (%)	52	80	45	45	45	45
	Jumlah Serangan OPT pada Tanaman Semusim dan Rempah yang Ditangani (ha)	87.000	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Luas Lahan Terdampak OPT yang Difasilitasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Semusim dan Rempah (ha)	87.000	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Luas Lahan Terdampak OPT yang Difasilitasi Sarana Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah (ha)	87.000	27.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Jumlah Serangan OPT pada Tanaman Tahunan dan Penyegar yang Ditangani (ha)	1.450.000	530.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Luas Lahan Terdampak OPT yang Difasilitasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Tahunan dan Penyegar (ha)	1.450.000	530.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Luas Lahan Terdampak OPT yang Difasilitasi Sarana Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar (ha)	1.450.000	530.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	Rasio Luas Area Perkebunan yang Ditangani Dibandingkan Area Terkena DPI (%)	40	40	40	40	40	40
	Jumlah Risiko DPI Tanaman Perkebunan yang Berhasil Dimitigasi (ha)	5.400	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	Jumlah Risiko Kebakaran yang Dimitigasi (ha)	15.150	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030

Indikator Kinerja sasaran Kegiatan		Akumulasi 2020-2024	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Resiko Gangguan Usaha yang Dimitigasi (kasus)	105	21	21	21	21	21
	Jumlah Resiko DPI yang Dimitigasi (ha)	5.400	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
	Jumlah Layanan Publik Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT (layanan)	36	-	9	9	9	9
	Jumlah Layanan Publik Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT (layanan)	44	8	9	9	9	9
	Jumlah Layanan Publik Data dan Informasi OPT (layanan)	15	3	3	3	3	3
	Jumlah Layanan Publik Kelembagaan Pengendalian OPT (layanan)	29	5	6	6	6	6
	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan (1-4 Skala Likert)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
B.	Realisasi s.d. 2022						
	Rasio Serangan OPT Perkebunan yang Ditangani terhadap Luas Serangan (%)	46,20	35,57	44,96	58,09	-	-
	Jumlah Serangan OPT pada Tanaman Semusim dan Rempah yang Ditangani (ha)	44.291	17.080	14.259	12.952	-	-
	Luas Lahan Terdampak OPT yang Difasilitasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Semusim dan Rempah (ha)	44.291	17.080	14.259	12.952	-	-
	Luas Lahan Terdampak OPT yang Difasilitasi Sarana Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah (ha)	44.291	17.080	14.259	12.952	-	-
	Jumlah Serangan OPT pada Tanaman Tahunan dan Penyegar yang Ditangani (ha)	700.902	176.428	230.500	293.974	-	-
	Luas Lahan Terdampak OPT yang Difasilitasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Tahunan dan Penyegar (ha)	700.902	176.428	230.500	293.974	-	-
	Luas Lahan Terdampak OPT yang Difasilitasi Sarana Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar (ha)	700.902	176.428	230.500	293.974	-	-
	Rasio Luas Area Perkebunan yang Ditangani Dibandingkan Area Terkena DPI (%)	39,83	39,44	40	40,06	-	-
	Jumlah Risiko DPI Tanaman Perkebunan yang Berhasil Dimitigasi (ha)	2.846	1065	1080	701	-	-
	Jumlah Resiko Kebakaran yang Dimitigasi (ha)	1.395	925	350	581	-	-
	Jumlah Resiko Gangguan Usaha yang Dimitigasi (kasus)	9	3	3	3	-	-
	Jumlah Resiko DPI yang Dimitigasi (ha)	2.846	1065	1080	701	-	-
	Jumlah Layanan Publik Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT (layanan)	18	-	9	9	-	-
	Jumlah Layanan Publik Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT (layanan)	26	8	9	9	-	-
	Jumlah Layanan Publik Data dan Informasi OPT (layanan)	9	3	3	3	-	-
	Jumlah Layanan Publik Kelembagaan Pengendalian OPT (layanan)	17	5	6	6	-	-
	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan (1-4 Skala Likert)	3,52	-	3,51	3,52	-	-
C.	Persentase Realisasi terhadap Target Renstra (%)						
	Rasio Serangan OPT Perkebunan yang Ditangani terhadap Luas Serangan (%)	88,84	44,46	99,91	129,09	-	-
	Jumlah Serangan OPT pada Tanaman Semusim dan Rempah yang Ditangani (%)	50,91	63,26	95,06	86,35	-	-
	Luas Lahan Terdampak OPT yang Difasilitasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Semusim dan Rempah (%)	50,91	63,26	95,06	86,35	-	-
	Luas Lahan Terdampak OPT yang Difasilitasi Sarana Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah (%)	50,91	63,26	95,06	86,35	-	-
	Jumlah Serangan OPT pada Tanaman Tahunan dan Penyegar yang Ditangani (%)	48,34	33,28	100,22	127,81	-	-
	Luas Lahan Terdampak OPT yang Difasilitasi Teknologi Pengendalian Hama Terpadu Tanaman Tahunan dan Penyegar (%)	48,34	33,28	100,22	127,81	-	-
	Luas Lahan Terdampak OPT yang Difasilitasi Sarana Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar (%)	48,34	33,28	100,22	127,81	-	-
	Rasio Luas Area Perkebunan yang Ditangani Dibandingkan Area Terkena DPI (%)	99,58	98,61	100	100,15	-	-
	Jumlah Risiko DPI Tanaman Perkebunan yang Berhasil Dimitigasi (%)	52,70	98,61	100	64,91	-	-
	Jumlah Resiko Kebakaran yang Dimitigasi (%)	9,21	30,53	11,55	19,17	-	-
	Jumlah Resiko Gangguan Usaha yang Dimitigasi (%)	8,57	14,29	14,29	14,29	-	-
	Jumlah Resiko DPI yang Dimitigasi (%)	52,70	98,61	100	64,91	-	-
	Jumlah Layanan Publik Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT (%)	50,00	-	100	100,00	-	-
	Jumlah Layanan Publik Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT (%)	59,09	100	100	100,00	-	-
	Jumlah Layanan Publik Data dan Informasi OPT (%)	60,00	100	100	100,00	-	-
	Jumlah Layanan Publik Kelembagaan Pengendalian OPT (%)	58,62	100	100	100,00	-	-
	Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan (%)	100,43	-	100,28	100,57	-	-

Berdasarkan **Tabel 5.** capaian kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2022 terhadap sasaran Renstra Direktorat Perlindungan Perkebunan 2020-2024 Revisi II dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio serangan OPT yang ditangani terhadap luas serangan OPT yang dilaporkan tahun 2022 mencapai 58,09% atau 129,09% dari target yang direncanakan yaitu 45,00%.
2. Rasio luas areal perkebunan yang ditangani akibat serangan DPI terhadap luas areal perkebunan yang berpotensi terdampak dengan target 40,00%, pada tahun 2022 tercapai 40,06% atau 100,15% dari target.
3. Jumlah Layanan Publik Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT Tahun 2022 dari target Renstra 9 layanan, telah tercapai 9 layanan atau mencapai 100%.
4. Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2022 dengan target 3,5 pada skala Likert tercapai 3,52 atau 100,57% dari target.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan.

Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan telah terealisasi, dengan realisasi keuangan mencapai 98,87% dan fisik 100%. Beberapa hal yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan – kegiatan tersebut antara lain:

1. Perencanaan kegiatan dilakukan secara baik dan terukur.
2. Cepat tanggap dengan segera menelaah POK dan revisi kegiatan apabila terjadi ketidaksesuaian baik yang terkait dengan unit cost, ketersediaan SDM dll.
3. Komitmen dalam melaksanakan kegiatan sesuai ROPAK yang telah dibuat.
4. Pembinaan yang terus dilakukan ke daerah baik melalui kunjungan ataupun melalui media elektronik seperti telpon, email, atau melalui aplikasi *meeting online*.
5. SDM yang melaksanakan kegiatan bertumpu pada petugas yang memiliki kapabilitas teknis yang memadai.

Permasalahan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut :

1. Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu segera dijabarkan ke dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis). Namun penyusunannya seringkali terlambat atau bahkan tidak dibuat oleh penanggung jawab kegiatan. Penyusunan juklak/juknis oleh Dinas seharusnya dilakukan sebelum kegiatan dimulai sehingga dapat menjabarkan/mengakomodir hal-hal yang spesifik lokasi namun tidak bertentangan dengan Pedoman Teknis Pusat.

2. Penetapan SK Pelaksana kegiatan Provinsi/Kabupaten seringkali terlambat, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawalan pengendalian OPT belum terkoordinir.
3. Keterlambatan penelaahan POK/DIPA oleh satker daerah sehingga ketika terdapat ketidaksesuaian terlambat dilakukan revisi yang dapat menunda pelaksanaan kegiatan.
4. Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu dan sasaran. Untuk itu perlu pengawalan setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa di ULP.
5. Jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten.
6. Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun anggaran. Bahkan ada beberapa kegiatan di daerah yang sudah selesai dilaksanakan tetapi laporannya tidak dikirimkan ke pusat. Sebaiknya penyelesaian dan penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun.
7. Keterbatasan SDM yang menangani perlindungan perkebunan (Pemandu lapang, Petugas Pengamat dan Petugas Laboratorium) mengakibatkan pelaksanaan kegiatan perlindungan perkebunan tidak optimal.
8. Pengendalian OPT oleh masyarakat secara swadaya terkendala oleh kurangnya kesadaran pekebun untuk memelihara kebunnya serta terbatasnya biaya pengendalian.
9. DIPA Kegiatan BioCF ISFL yang masuk dalam kegiatan Dampak Perubahan Iklim baru diterima pada bulan Juni 2022, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terealisasi 100%.

Solusi/upaya tindak lanjut terhadap permasalahan, kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat sosialisasi pedoman teknis dan ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan kegiatan serta disosialisasikan secara tepat serta pengawalan dan monev yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.
2. Mempercepat penetapan SK Pelaksana kegiatan di provinsi/kabupaten.
3. Meminimalisir revisi anggaran dengan mematangkan sistem perencanaan dan penetapan CP/CL serta dukungan administrasi lainnya dengan penetapan dan pelaksanaan lebih awal.
4. Melakukan monitoring dan pembinaan secara kontinyu baik dalam bentuk kunjungan lapang langsung, pengiriman surat rekomendasi dari Direktur Perlindungan Perkebunan, maupun melalui media lainnya secara daring.
5. Melakukan koordinasi dan mendorong Penanggung jawab provinsi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal/rencana yang telah disusun/ditetapkan.
6. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang berasal dari pendanaan hibah luar negeri.

Peran serta pemerintah daerah, masyarakat dan swasta memegang peranan yang sangat penting dalam keberhasilan kegiatan terutama penanganan OPT dan DPI, sehingga apabila tidak dilakukan peranan tersebut secara bersama-sama akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dan dapat beresiko menyebabkan kegagalan untuk penanganan OPT dan DPI.

3.1.5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis pencapaian kinerja kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2022 dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 22 tahun 2021 disajikan pada **Tabel 6**. Dari tabel tersebut diketahui Nilai Efisiensi (NE) kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan rata-rata sebesar 53,29% dan Efisiensi (E) 1,32. Formula untuk mengukur nilai efisiensi berdasarkan PMK nomor 22 tahun 2021 seperti pada **Lampiran 6**. Kegiatan dikatakan efisien apabila memiliki Nilai Efisiensi (NE) ≥ 50 sd 100, dimana nilai paling efisien di angka NE=50. Kegiatan juga dikatakan efisien bila memiliki Efisiensi (E) antara -20 sd 20 dimana paling efisien di angka E= 0.

Tabel 6. Nilai Efisiensi Pencapaian Kinerja Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2022

No	Kegiatan	Target			Realisasi					NE (%)	E
		Keuangan Rp.(000)	Fisik		Keuangan Rp.(000)	(%)	Fisik				
			VOL	SAT			VOL	SAT	%		
1	ABR.001-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	694.316	14	Rekom-tek	689.020	99,24	14	Rekom-tek	100,00	51,91	0,76
2	AFA.001-Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	5.701.974	7	NSPK	5.559.894	97,51	7	NSPK	100,00	56,23	2,49
3	CAG.001-Perangkat Perlindungan Perkebunan	6.562.340	61	Unit	6.527.015	99,46	61	Unit	100,00	51,35	0,54
4	PDC.001-Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	5.580.459	48	Desa	5.549.971	99,45	48	Desa	100,00	51,37	0,55
5	QDD.001-Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	200.000	3	Kasus	200.000	100,00	3	Kasus	100,00	50,00	0,00
6	RAI.001-Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	13.448.279	701	Ha	12.814.698	95,29	701	Ha	100,00	61,78	4,71
	RAI.002-Area Penanganan OPT Tanaman Perkebunan	50.063.694	11.631	Ha	49.984.900	99,84	11.631	Ha	100,00	50,39	0,16
	TOTAL/RATA-RATA	82.251.062			81.325.498	98,87				53,53	1,32

Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan yang terkait komoditas (kopi, kakao, lada, cengkeh, karet, jambu mete dan kelapa sawit) disajikan pada **Tabel 7** hingga **Tabel 15**.

Tabel 7. Nilai Efisiensi Penguatan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Lada

Kegiatan	Target			Realisasi					NE (%)	E
	Keuangan Rp.(000)	Fisik		Keuangan Rp.(000)	(%)	Fisik				
		VOLUME	SAT			Volume	Sat	%		
Penerapan PHT OPT Lada	528.500	200	Ha	527.686	99,85	200	Ha	100,00	50,38	0,15

Tabel 8. Nilai Efisiensi Penguatan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kopi

Kegiatan	Target			Realisasi					NE (%)	E
	Keuangan Rp.(000)	Fisik		Keuangan Rp.(000)	(%)	Fisik				
		Volume	Sat			Volume	Sat	%		
Penerapan PHT OPT Tanaman Kopi	225.150	150	Ha	224.412	99,79	150	Ha	100,00	50,52	0,21
Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim (Prov. Jabar, Jateng dan BBPPTP Surabaya)	1.077.595	60	Ha	1.073.404	99,61	60	Ha	100,00	51,42	0,57
TOTAL/RATA-RATA	1.302.745	210	Ha	1.297.816	99,62	210	Ha	100,00	51,29	0,52

Tabel 9. Nilai Efisiensi Penguatan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kakao

Kegiatan	Target			Realisasi					NE (%)	E
	Keuangan Rp.(000)	Fisik		Keuangan Rp.(000)	(%)	Fisik				
		Volume	Sat			Volume	Sat	%		
Penerapan PHT OPT Tanaman Kakao	493.600	200	Ha	493.188	99,92	200	Ha	100,00	50,21	0,08
Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim (Prov. DI. Yogyakarta)	346.525	20	Ha	345.280	99,64	20	Ha	100,00	50,90	0,64
TOTAL/RATA-RATA	840.125	220	Ha	838.468	99,80	220	Ha		50,49	0,64

Tabel 10. Nilai Efisiensi Penguatan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Cengkeh

Kegiatan	Target			Realisasi					NE (%)	E
	Keuangan Rp.(000)	Fisik		Keuangan Rp.(000)	(%)	Fisik				
		Volume	Sat			Volume	Sat	%		
Penerapan PHT OPT Cengkeh	281.550	150	Ha	273.754	97,23	150	Ha	100,00	56,92	2,77

Tabel 11. Nilai Efisiensi Penguatan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Karet

Kegiatan	Target			Realisasi					NE (%)	E
	Keuangan Rp.(000)	Fisik		Keuangan Rp.(000)	(%)	Fisik				
		Volume	Sat			Volume	Sat	%		
Pengendalian OPT Tanaman Karet	137.937	75	Ha	130.117	94,33	75	Ha	100,00	64,17	5,67

Tabel 12. Nilai Efisiensi Penguatan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Jambu Mete

Kegiatan	Target			Realisasi					NE (%)	E
	Keuangan Rp.(000)	Fisik		Keuangan Rp.(000)	(%)	Fisik				
		Volume	Sat			Volume	Sat	%		
Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim (Prov. Bali dan NTB)	717.800	40	Ha	684.747	95,40	40	Ha	100,00	61,51	4,60

Tabel 13. Nilai Efisiensi Penguatan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kelapa Sawit

Kegiatan	Target			Realisasi					NE (%)	E
	Keuangan Rp.(000)	Fisik		Keuangan Rp.(000)	(%)	Fisik				
		Volume	Sat			Volume	Sat	%		
Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan tanpa Membakar	2.278.450	100	Ha	2.250.245	98,76	100	Ha	100,00	53,09	2,29

Tabel 14. Nilai Efisiensi Penguatan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Kelapa

Kegiatan	Target			Realisasi					NE (%)	E
	Keuangan Rp.(000)	Fisik		Keuangan Rp.(000)	(%)	Fisik				
		Volume	Sat			Volume	Sat	%		
Pengendalian OPT Tanaman Karet	225.687	100	Ha	224.887	99,65	100	Ha	100,00	50,89	0,35

Tabel 15. Nilai Efisiensi Penguatan Perlindungan Perkebunan pada Komoditas Tebu

Kegiatan	Target			Realisasi					NE (%)	E
	Keuangan Rp.(000)	Fisik		Keuangan Rp.(000)	(%)	Fisik				
		Volume	Sat			Volume	Sat	%		
Pengendalian OPT Tanaman Tebu	252.950	100	Ha	252.290	99,74	100	Ha	100,00	50,65	0,26

3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Secara keseluruhan kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan berhasil menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan terdiri dari Area Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan, Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun, Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan, Perangkat Perlindungan Perkebunan, Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan, dan Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan.

Kegiatan pendukung untuk Area Penanganan Organisme Pengganggu Tanaman Perkebunan yaitu Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar dan Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah. Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar terdiri dari (a) Penerapan PHT OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar serta (b) Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar. Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah terdiri dari (a) Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah serta (b) Penerapan PHT OPT Tanaman Semusim dan Rempah. Nilai Efisiensi (NE) dan Efisiensi (E) disajikan pada **Tabel 16**.

Kegiatan pendukung untuk Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun yaitu Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, serta Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar. Nilai efisiensi (NE) dan Efisiensi (E) kegiatan yang mendukung Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun disajikan pada **Tabel 17**.

Tabel 16. Nilai Efisiensi Area Penanganan OPT Perkebunan

Kegiatan	Target			Realisasi					NE (%)	E
	Keuangan Rp.(000)	Fisik		Keuangan Rp.(000)	(%)	Fisik				
		Volume	Sat			Volume	Sat	%		
Area Penanganan OPT Tanaman Perkebunan	50.063.694	11.631	Ha	49.984.900	99,84	11.631	Ha	100,00	50,39	0,16
Pengendalian OPT Tanaman Tahunan Dan Penyegar	25.986.733	5.156	Ha	25.948.465	99,85	5.156	Ha	100,00	50,37	0,15
Pengendalian OPT Tanaman Semusim Dan Rempah	24.076.961	6.475	Ha	24.036.435	99,83	6.475	Ha	100,00	50,42	0,17

Tabel 17. Nilai Efisiensi Area Penanganan DPI dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun

Kegiatan	Target			Realisasi					NE (%)	E
	Keuangan Rp.(000)	Fisik		Keuangan Rp.(000)	(%)	Fisik				
		Volume	Sat			Volume	Sat	%		
Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim Dan Pencegahan Kebakaran Lahan Dan Kebun	13.448.279	701	Ha	12.814.698	95,29	701	Ha	100,00	61,78	4,71
Mitigasi Dan Adaptasi Perubahan Iklim	4.141.920	120	Ha	3.652.565	88,19	120	Ha	100,00	79,54	11,81
Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan Dan Kebun	7.027.909	481	Ha	6.911.888	98,35	481	Ha	100,00	54,13	1,65
Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar	2.278.450	100	Ha	2.250.245	98,76	100	Ha	100,00	53,09	1,24

Perangkat Perlindungan Perkebunan terdiri dari (a) Operasional Laboratorium Lapang (LL), (b) Operasional Laboratorium Utama Pengendali Hayati (LUPH), (c) Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT, serta (d) Operasional Brigade Proteksi Tanaman. Nilai efisiensi (NE) dan Efisiensi (E) yang mendukung kegiatan Perangkat Perlindungan Perkebunan disajikan pada **Tabel 18**.

Tabel 18. Nilai Efisiensi Perangkat Perlindungan Perkebunan

Kegiatan	Target			Realisasi					NE	E
	Keuangan Rp.(000)	Fisik		Keuangan Rp.(000)	(%)	Fisik				
		Volume	Sat			Volume	Sat	%		
Perangkat Perlindungan Perkebunan										
Operasional Laboratorium Lapangan (LL)	783.350	27	Unit	778.726	99,41	27	Unit	100,00	51,48	0,59
Operasional Laboratorium Utama Pengendali Hayati (Luph)	90.600	3	Unit	90.451	99,84	3	Unit	100,00	50,41	0,16
Pemberdayaan Petugas Pengamat Opt	2.955.900	1.139	Org	2.949.658	99,79	1.139	Org	100,00	50,53	0,21
Operasional Brigade Proteksi Tanaman	1.391.210	31	Unit	1.376.485	98,94	31	Unit	100,00	52,65	1,06
Total/Rata-Rata	5.221.060			5.195.320	99,51				51,27	0,51

3.2. Realisasi Anggaran

3.2.1. Akuntabilitas Terhadap Target Serapan Direktorat Perlindungan Perkebunan

Direktorat Perlindungan Perkebunan pada tahun 2022 mendapat alokasi anggaran untuk kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan sebesar Rp Rp. **82.251.062.000,-** dan terserap sebesar Rp. **81.325.498.415,-** atau **98,87%**. Meskipun realisasi anggaran kegiatan pusat maupun daerah untuk kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan tidak mencapai 100%, namun realisasi fisik mencapai 100%. Hal tersebut karena pada kegiatan Pusat maupun di daerah terjadi efisiensi serta optimalisasi dalam pelaksanaan kegiatan.

3.2.2. Akuntabilitas Terhadap Capaian Fisik Direktorat Perlindungan Perkebunan

Rincian capaian serapan keuangan dan fisik untuk output kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan dilihat pada **Tabel 19**.

Akuntabilitas terhadap capaian fisik kegiatan 2022 berdasarkan **Tabel 19**, diuraikan sebagai berikut :

1. ABR/001-Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan dari pagu anggaran Rp. **694.316.000,-** terealisasi Rp. **689.020.082,-** (**99,24%**) dengan capaian fisik 100%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai 100% disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

Tabel 19. Capaian Serapan Keuangan dan Fisik Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan Pusat, Daerah dan UPT Pusat

No	Kegiatan	Anggaran			Fisik Output
		Pagu	Realisasi		
		Rp.	Rp.	%	%
1779	Penguatan Perlindungan Perkebunan	82.251.062.000	81.325.498.415	98,87	100
	DAERAH	21.184.268.000	20.993.951.460	99,10	100
1	ABR/001-Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	694.316.000	689.020.082	99,24	100
2	RAI/002-Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	2.245.374.000	2.219.987.324	98,87	100
3	RAI/001-Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	5.901.779.000	5.807.957.288	98,41	100
4	PDC/001-Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan	5.580.459.000	5.549.971.456	99,45	100
5	CAG/001-Perangkat Perlindungan Perkebunan	5.221.060.000	5.195.319.600	99,51	100
6	CAG/002-Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan	1.341.280.000	1.331.695.710	99,29	100
7	QDD/001-Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan	200.000.000	200.000.000	100	100
	PUSAT	61.066.794.000	60.331.546.955	98,80	100
1	AFA/001-Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	5.701.974.000	5.559.893.866	97,51	100
2.	RAI/002-Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan	47.818.320.000	47.764.912.546	99,89	100
3.	RAI/001-Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	7.546.500.000	7.006.740.543	92,85	100

2. RAI.002-Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan dari pagu anggaran Rp. **2.245.374.000,-** terealisasi Rp. **2.219.987.324,-** (**98,87%**) dengan capaian fisik 100%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai 100% disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
3. RAI.001-Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun dari pagu anggaran Rp. **5.901.779.000,-** terealisasi Rp. **5.807.957.288,-** (**98,41%**) dengan capaian fisik 100%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai 100% disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.

4. PDC.001-Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan dari pagu anggaran Rp. **5.580.459.000,-** terealisasi Rp. **5.549.971.456,-** (**99,45%**) dengan capaian fisik 100%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai 100% disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
5. CAG.001-Perangkat Perlindungan Perkebunan dari pagu anggaran Rp. **5.221.060.000,-** terealisasi Rp. **5.195.319.600,-** (**99,51%**) dengan capaian fisik 100%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai 100% disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
6. CAG.002-Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan dari pagu anggaran Rp. **1.341.280.000,-** terealisasi Rp. **1.331.695.710,-** (**99,29%**) dengan capaian fisik 100%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai 100% disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
7. QDD.001-Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan dari pagu anggaran Rp. **200.000.000,-** terealisasi Rp. **200.000.000,-** (**100%**) dengan capaian fisik 100%. Realisasi fisik mencapai 100% disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
8. Kegiatan pusat terdiri dari AFA.001-Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan, RAI.002-Area Penanganan OPT Tanaman Perkebunan dan RAI.001-Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun. Kegiatan AFA.001-Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan dari pagu anggaran Rp. **5.701.974.000,-** terealisasi Rp. **5.559.893.866,-** (**97,51%**) dengan capaian fisik 100%. Kegiatan RAI.002-Area Penanganan OPT Tanaman Perkebunan dari pagu anggaran Rp. **47.818.320.000,-** terealisasi Rp. **47.764.912.546,-** (**99,89%**) dengan capaian fisik 100%. Kegiatan RAI.001-Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun dari pagu anggaran Rp. **7.546.500.000,-** terealisasi Rp. **7.006.740.543,-** (**92,85%**) dengan capaian fisik 100%. Realisasi keuangan tidak mencapai 100%, namun fisik mencapai 100% disebabkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan.
9. Secara keseluruhan, kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan tahun 2022 dari pagu Rp. **82.251.062.000,-** terealisasi Rp. **81.325.498.415,-** (**98,87%**) dengan capaian fisik 100%. Rincian realisasi kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan 2022 (pusat, UPT Pusat dan daerah) seperti pada **Lampiran 4**, realisasi kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan 2022 (pusat dan daerah, tanpa UPT Pusat) seperti pada **Lampiran 7 dan 8**.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Perlindungan Perkebunan tahun 2022 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban selama periode tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan penjabaran dari penyelenggaraan program kerja Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Perlindungan Perkebunan 2020-2024 Revisi II.

Sasaran Kegiatan Direktorat Perlindungan Perkebunan terdiri dari 2 (dua) Sasaran yaitu Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan dan Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel, serta 4 (empat) Indikator Kinerja. Pada tahun 2022, Sasaran Terkendalnya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan terdiri dari 3 (tiga) Indikator yaitu Rasio serangan OPT perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan dari target 45,00% tercapai 58,09% (129,09%); Rasio luas area perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI dengan target 40,00% tercapai 40,06% (100,15%); Jumlah layanan publik data dan kelembagaan pengendalian OPT dengan target 9,00 layanan tercapai 9,00 layanan (100%). Sasaran Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel dengan Indikator Kinerja Tingkat kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan dengan target 3,50 Skala *Likert* tercapai 3,52 Skala *Likert* (100,57%).

Berdasarkan penilaian kinerja yang berpedoman pada Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Permenpan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 22 tahun 2021 maka keluaran (*outputs*) capaian kinerja keuangan mencapai 98,87% dari pagu dan realisasi fisik mencapai 100%, dengan nilai efisiensi (NE) 53,29% dan Efisiensi (E) 1,32 yang menunjukkan kegiatan terlaksana dengan efisien.

Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi kinerja perlindungan adalah Pedoman Teknis yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan kegiatan perlu dijabarkan ke dalam Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Petunjuk Teknis (Juknis) namun penyusunannya seringkali terlambat atau bahkan tidak dibuat oleh penanggung jawab kegiatan; Penetapan SK Pelaksana kegiatan Provinsi/Kabupaten seringkali terlambat, sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan pengendalian OPT belum terkoordinir; Keterlambatan penelaahan POK/DIPA oleh satker daerah sehingga ketika terdapat ketidaksesuaian terlambat dilakukan revisi yang dapat

menunda pelaksanaan kegiatan; Proses pengadaan barang/jasa tidak tepat waktu sehingga pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu dan sasaran.; Jadwal pelaksanaan dan tahapan penarikan uang kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ROPAK yang telah disusun. Penarikan anggaran harus mengacu pada ROPAK dan dilaksanakan secara konsisten; Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan tidak segera dilaporkan kepada Pusat tetapi menunggu sampai akhir tahun anggaran. Bahkan ada beberapa kegiatan di daerah yang sudah selesai dilaksanakan tetapi laporannya tidak dikirimkan ke pusat. Sebaiknya penyelesaian dan penyampaian laporan dilakukan paling lambat dua minggu setelah kegiatan dilaksanakan, tanpa harus menunggu akhir tahun; Keterbatasan SDM yang menangani perlindungan perkebunan (Pemandu lapang, Petugas Pengamat dan petugas laboratorium) mengakibatkan pelaksanaan kegiatan perlindungan perkebunan tidak optimal.

4.2. Saran

Saran untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan antara lain dengan mempercepat sosialisasi pedoman teknis dan ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis serta petunjuk pelaksanaan kegiatan serta disosialisasikan secara tepat serta pengawalan dan money yang lebih ketat terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan; Mempercepat penetapan SK Pelaksana kegiatan di provinsi/kabupaten; Meminimalisir revisi anggaran dengan mematangkan sistem perencanaan dan penetapan CP/CL serta dukungan administrasi lainnya dengan penetapan dan pelaksanaan lebih awal; Melakukan monitoring dan pembinaan secara kontinyu baik dalam bentuk kunjungan lapang langsung, pengiriman surat rekomendasi dari Direktorat Perlindungan Perkebunan, maupun melalui media lainnya secara daring; Melakukan koordinasi dan mendorong Penanggung jawab provinsi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal/rencana yang telah disusun/ditetapkan; serta Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan yang berasal dari pendanaan hibah luar negeri.



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

KANPUS KEMENTERIAN PERTANIAN JALAN HARSONO RM NO. 3,
GEDUNG C PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
TELEPON (021) 7815380 - 4, FAKSIMILI (021) 7815486 - 7815586
WEBSITE : <http://ditjenbun.pertanian.go.id>

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
Direktorat Perlindungan Perkebunan**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Baginda Siagian
Jabatan : Direktur Perlindungan Perkebunan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andi Nur Alam Syah
Jabatan : Direktur Jenderal Perkebunan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2022

Pihak Kedua

Andi Nur Alam Syah

Pihak Pertama

Baginda Siagian

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN**

No	Sasaran	Kode	Indikator Kinerja	Target
1	Terkendalinya Penyebaran OPT dan DPI pada Tanaman Perkebunan	1-1	Rasio serangan OPT Perkebunan yang ditangani terhadap luas serangan OPT tanaman perkebunan	45.00 %
		1-2	Rasio luas area Perkebunan yang ditangani dibandingkan area terkena DPI	40.00 %
		1-3	Jumlah layanan publik data dan kelembagaan pengendalian OPT	9.00 Layanan
2	Terwujudnya pengelolaan manajemen ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan yang efektif, efisien dan akuntabel	2-1	Tingkat Kepuasan pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap layanan ketatausahaan Direktorat Perlindungan Perkebunan	3.50 Skala Likert

KEGIATAN

1 Penguatan Perlindungan Perkebunan

Pihak Kedua



Andi Nur Alam Syah

ANGGARAN

Rp. 76,948,382,000

Jakarta, Desember 2022

Pihak Pertama



Baginda Siagian

Lampiran 2. Rekapitulasi Pengendalian OPT Tahun 2022

DATA PENGENDALIAN OPT TAHUN 2022

No	Komoditi	OPT	Serangan OPT (ha)	Pengendalian OPT (ha)	%
1	Kakao	PBK	164.430	60.800	36,98
2	Kopi	PBKo	74.973	41.149	54,89
3	Karet	Gugur Daun	116.759	116.759	100,00
4	Kelapa	Kumbang <i>Oryctes rhinoceros</i>	73.001	15.923	21,81
5	Kelapa sawit	<i>Ganoderma Boninense</i>	46.896	44.645	95,20
6	Teh	<i>Helopeltis</i> spp	6.706	6.706	100,00
7	Jambu mete	<i>Helopeltis</i> spp	9.073	7.990	88,06
8	Kapas	Penggerek Buah	0,5	0,5	100,00
9	Tembakau	Ulat grayak <i>Spodoptera litura</i>	492	492	100,00
10	Nilam	Budok	123	44	35,75
11	Pala	Penggerek batang <i>Batocera hercules</i>	3.858	525	13,60
12	Lada	Busuk Pangkal Batang	11.959	6.206	51,89
13	Cengkeh	Penggerek Batang <i>Nothopeus hemipterus</i>	17.714	5.150	29,07
14	Tebu	Penggerek Batang (<i>Chilo</i> sp.)	2.322	535	23,02
15	Sagu	Kumbang <i>Oryctes rhinoceros</i>	32	3	9,67
Jumlah			528.339	306.926	58,09

Sumber: Aplikasi Sipereda OPT

Merupakan Data OPT yang paling banyak menyerang

DATA PENGENDALIAN OPT TAHUN 2022

No	Komoditi	OPT	Provinsi	Serangan OPT (ha)	Pengendalian OPT (ha)	%
1	Kakao	PBK		164.430	60.800	36,98
			1 ACEH	26.358	2.042	
			2 BALI	723	723	
			3 BANTEN	428	100	
			4 BENGKULU	2.046	133	
			5 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	142	107	
			6 GORONTALO	1.532	376	
			7 JAMBI	33	25	
			8 JAWA BARAT	6	7	
			9 JAWA TENGAH	292	110	
			10 JAWA TIMUR	585	176	
			11 KALIMANTAN BARAT	-	-	
			12 KALIMANTAN SELATAN	2	-	
			13 KALIMANTAN TENGAH	1	-	
			14 KALIMANTAN TIMUR	24	4	
			15 KEPULAUAN RIAU	-	-	
			16 LAMPUNG	1.067	496	
			17 MALUKU	131	-	
			18 MALUKU UTARA	560	-	
			19 NUSA TENGGARA BARAT	364	162	
			20 NUSA TENGGARA TIMUR	3.436	1.467	
			21 PAPUA	2.359	-	
			22 PAPUA BARAT	1.675	29	
			23 RIAU	55	55	
			24 SULAWESI BARAT	20.261	8.181	
			25 SULAWESI SELATAN	44.589	27.914	
			26 SULAWESI TENGAH	35.651	550	
			27 SULAWESI TENGGARA	11.067	9.598	
			28 SULAWESI UTARA	1.958	341	
			29 SUMATERA BARAT	1.852	542	
			30 SUMATERA UTARA	7.233	7.662	
2	Kopi	PBKo		74.973	41.149	54,89
			1 ACEH	19.850	1010	
			2 BALI	347	347,07	
			3 BENGKULU	10.316	644	
			4 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	26	8	
			5 GORONTALO	26	0	
			6 JAMBI	509	78,5	
			7 JAWA BARAT	2.022	36,1	
			8 JAWA TENGAH	948	652,83	
			9 JAWA TIMUR	254	63,24	
			10 KALIMANTAN BARAT	10	0	
			11 KALIMANTAN SELATAN	52	52	
			12 KALIMANTAN TENGAH	13	1	
			13 LAMPUNG	1.033	485,1	
			14 NUSA TENGGARA BARAT	142	28,7	
			15 NUSA TENGGARA TIMUR	67	47,8	
			16 PAPUA BARAT	-	0	
			17 RIAU	-	0	
			18 SULAWESI BARAT	51	1,97	
			19 SULAWESI SELATAN	3.497	2183,58	
			20 SULAWESI TENGGARA	11	5	
			21 SULAWESI TENGAH	1.351	0	
			22 SULAWESI UTARA	1.191	322	
			23 SUMATERA BARAT	212	63	
			24 SUMATERA SELATAN	11.222	6723	
			25 SUMATERA UTARA	21.823	28396,48	
3	Karet	Gugur daun		116.759	116.759	100,00
			1 ACEH	850	65	
			2 BENGKULU	1.086	50	
			3 JAMBI	1243	124,5	
			4 JAWA BARAT	589,95	38,2	
			5 JAWA TENGAH	0	0	
			6 KALIMANTAN BARAT	750	2	
			7 KALIMANTAN SELATAN	1433	26	
			8 KALIMANTAN TENGAH	130,08	3,08	
			9 KALIMANTAN TIMUR	21	2	
			10 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	13873,43	1088,3	
			11 LAMPUNG	423	221	
			12 RIAU	130,5	130,5	
			13 SUMATERA BARAT	968	0	
			14 SUMATERA SELATAN	17906	7603	
			15 SUMATERA UTARA	77355,2	107405,6	

No	Komoditi	OPT	Provinsi	Serangan OPT (ha)	Pengendalian OPT (ha)	%
4	Kelapa	Kumbang <i>Oryctes rhinoceros</i>		73.001,4	15.923,2	21,81
			1 ACEH	2491,3	4,2	
			2 BALI	1463,68	1463,68	
			3 BANTEN	172,5	0	
			4 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	2210,05	443,5	
			5 GORONTALO	97,2	97,2	
			6 JAMBI	549	59	
			7 JAWA BARAT	1910,53	21,5	
			8 JAWA TENGAH	11831,47	2560,93	
			9 JAWA TIMUR	6991,75	334,75	
			10 KALIMANTAN BARAT	199	0	
			11 KALIMANTAN SELATAN	541,9	51	
			12 KALIMANTAN TENGAH	45,67	1,08	
			13 KALIMANTAN TIMUR	2,5	1,5	
			KALIMANTAN UTARA	3	3	
			14 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	216,31	69,13	
			15 KEPULAUAN RIAU	60,93	58,93	
			16 LAMPUNG	1779	897	
			17 MALUKU	610,98	0	
			18 MALUKU UTARA	768	0	
			19 NUSA TENGGARA BARAT	2445,95	929,1	
			20 NUSA TENGGARA TIMUR	3984,11	1070,07	
			21 PAPIA	219,5	0	
			22 PAPIA BARAT	738,14	54,83	
			23 RIAU	2167,9	992,4	
			24 SULAWESI BARAT	3430,88	495,4	
			25 SULAWESI SELATAN	5399,63	3740,28	
			26 SULAWESI TENGAH	11944	0	
			27 SULAWESI TENGGARA	1493	870,2	
			28 SULAWESI UTARA	5694,22	1028,25	
			29 SUMATERA BARAT	140	15	
			30 SUMATERA SELATAN	283	141	
			31 SUMATERA UTARA	3116,26	520,31	
5	Kelapa sawit	<i>Ganoderma Boninense</i>		46.896,2	44.644,7	95,20
			1 ACEH	633	150,3	
			2 BENGKULU	434	73	
			3 JAMBI	121,5	15	
			4 KALIMANTAN BARAT	0	0	
			5 KALIMANTAN SELATAN	32	0	
			6 KALIMANTAN TENGAH	31,5	1	
			7 KALIMANTAN TIMUR	7,3	7	
			8 KALIMANTAN UTARA	0	0	
			9 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	36,02	16,68	
			10 LAMPUNG	188	78	
			11 RIAU	1126,9	116,5	
			12 SULAWESI SELATAN	8,5	8,6	
			13 SUMATERA BARAT	159	62	
			14 SUMATERA SELATAN	693	196	
			15 SUMATERA UTARA	43425,5	43920,65	
6	Teh	<i>Helopeltis spp</i>		6706	6706	100,00
			1 JAWA BARAT	6706	6706	
7	Jambu mete	<i>Helopeltis spp</i>		9073,0	7989,7	88,06
			1 BALI	73,64	73,64	
			2 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	1,56	0	
			3 JAWA TENGAH	83,64	0	
			4 JAWA TIMUR	0	0	
			5 MALUKU	14,17	0	
			6 NUSA TENGGARA BARAT	450,53	68,3	
			7 NUSA TENGGARA TIMUR	370,17	36,73	
			8 SULAWESI TENGGARA	7488	7348,3	
			9 SULAWESI SELATAN	591,25	462,71	
8	Kapas	Penggerek Buah		0,5	0,5	100,00
			1 BALI	0,5	0,5	
9	Tembakau	Ulat grayak <i>Spodoptera litura</i>		492,3	492,3	100,00
			1 ACEH	11,6	0,2	
			2 JAWA BARAT	1,6	1,6	
			3 JAWA TENGAH	219,91	397,87	
			4 JAWA TIMUR	4,36	0	
			5 NUSA TENGGARA BARAT	254,8	92,6	
10	Nilam	Budok		123,1	44	35,75
			1 ACEH	18,8	4	
			2 JAMBI	10	3	
			3 JAWA TENGAH	0,27	0	
			4 JAWA TIMUR	0	0	
			5 SUMATERA BARAT	94	37	

No	Komoditi	OPT	Provinsi	Serangan OPT (ha)	Pengendalian OPT (ha)	%
11	Pala	Penggerek batang <i>Batocera hercules</i>		3857,8	524,7	13,60
			1 ACEH	115,4	100,4	
			2 MALUKU	490,36	0	
			3 MALUKU UTARA	59	0	
			4 PAPUA BARAT	0	0	
			5 SULAWESI SELATAN	22	22	
			6 SULAWESI TENGGARA	6	6	
			7 SULAWESI UTARA	3165	396,25	
12	Lada	Busuk Pangkal Batang		11959,2	6205,8	51,89
			1 ACEH	36,58	0	
			2 BANTEN	123	25	
			3 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	3,03	4	
			4 JAWA BARAT	15,5	17,5	
			5 JAWA TENGAH	244,76	35,36	
			6 JAWA TIMUR	0	0	
			7 KALIMANTAN BARAT	18	0	
			8 KALIMANTAN SELATAN	5	0	
			9 KALIMANTAN TENGAH	4,24	0,08	
			10 KALIMANTAN TIMUR	19	5	
			11 KALIMANTAN UTARA	5	3	
			12 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	5873,95	2313,28	
			13 KEPULAUAN RIAU	30	30	
			14 LAMPUNG	742,75	505	
			15 SULAWESI BARAT	22	2	
			16 SULAWESI SELATAN	1779,96	547,44	
			17 SULAWESI TENGGARA	2707,4	2478,1	
			18 SUMATERA SELATAN	329	240	
13	Cengkeh	Penggerek Batang <i>Nothopeus hemipterus</i>		17714,3	5149,9	29,07
			1 ACEH	34,9	0	
			2 BALI	982,02	982,02	
			BANTEN	103	0	
			3 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	135,6	1	
			4 GORONTALO	60,73	57,15	
			5 JAWA BARAT	60,3	347,9	
			6 JAWA TENGAH	2197,83	616,95	
			7 JAWA TIMUR	437,43	59,74	
			8 KEPULAUAN RIAU	30,42	29,42	
			9 LAMPUNG	45,8	9,3	
			10 MALUKU UTARA	166	0	
			11 SULAWESI BARAT	78	0	
			12 SULAWESI SELATAN	2245,73	1152,22	
			13 SULAWESI TENGAH	4915	100	
			14 SULAWESI TENGGARA	1047,4	243,2	
			15 SULAWESI UTARA	5174,09	1551	
14	Tebu	Penggerek Batang (<i>Chilo</i> sp.)		2322,3	534,5	23,02
			1 ACEH	8,9	0	
			2 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	40,5	23	
			3 GORONTALO	92,7	0	
			4 JAWA BARAT	0	0	
			5 JAWA TENGAH	1041,38	389,85	
			6 JAWA TIMUR	1100,58	121,65	
			7 LAMPUNG	38	0	
			8 SULAWESI SELATAN	0,23	0	
15	Sagu	Kumbang <i>Oryctes rhinoceros</i>		31,6	3,1	9,67
			1 KEPULAUAN RIAU	3,05	3,05	
			2 PAPUA BARAT	28,5	0	
	Jumlah			528.339	306.926	58,09

Sumber: Aplikasi Sipereda OPT
Merupakan Data OPT yang paling banyak menyerang
Tanaman Semusim dan Rempah (No.8-14)
Tanaman Tahunan dan Penyegar (No. 1-7 dan No. 15)

Lampiran 3. Rekapitulasi Penanganan DPIPK Tahun 2022

REKAP PENANGANAN DPIPK TAHUN 2022

NO	PROVINSI	Terdampak (ha)	Tertangani (ha)
1	Jawa Barat	70,175	20
2	Jawa Tengah	28,245	20
3	DI Yogyakarta	24,92	20
4	Bali	22,4	20
5	Nusa Tenggara Barat	344,33	20
6	Jawa Timur	83,3	20
7	Riau	165,55	90
8	Jambi	309,295	115
9	Sumatera Selatan	124,88	115
10	Kalimantan Tengah	234,22	115
11	Kalimantan Selatan	200,13	85
12	Kalimantan Timur	142,52	60
TOTAL		1750	701

Lampiran 4. Realisasi Keuangan Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan Pusat, UPT Pusat dan Daerah Tahun 2022

ITI	KODE	KEGIATAN	PROVINSI	KABUPATEN	TARGET		REALISASI			
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		DITJEN PERKEBUNAN				82.251.062.000			81.325.498.415	98,87
		Ditjen Perkebunan				82.251.062.000			81.325.498.415	98,87
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				82.251.062.000			81.325.498.415	98,87
1779		Penguatan Perlindungan Perkebunan				82.251.062.000			81.325.498.415	98,87
1779.ABR		Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan			Rekomendasi Kebijakan	694.316.000		Rekomendasi Kebijakan	689.020.082	99,24
1779.ABR.001	1	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan			14 Rekomendasi Teknologi	694.316.000	14	Rekomendasi Teknologi	689.020.082	99,24
	1	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan			14 Rekomendasi Teknologi	694.316.000	14	Rekomendasi Teknologi	689.020.082	99,24
	1	Rekomendasi Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan			14 Rekomendasi Teknologi	694.316.000	14	Rekomendasi Teknologi	689.020.082	99,24
			1 BBPZTP SURABAYA	1 BBPZTP SURABAYA	4 Rekomendasi Teknologi	160.349.000	4	Rekomendasi Teknologi	158.927.672	99,11
			2 BBPZTP MEDAN	2 BBPZTP MEDAN	3 Rekomendasi Teknologi	206.624.000	3	Rekomendasi Teknologi	206.304.410	99,85
			3 BBPZTP AMBON	3 BBPZTP AMBON	4 Rekomendasi Teknologi	121.824.000	4	Rekomendasi Teknologi	121.823.000	100,00
			4 BPTP PONTIANAK	4 BPTP PONTIANAK	3 Rekomendasi Teknologi	205.519.000	3	Rekomendasi Teknologi	201.965.000	98,27
1779.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			7 NSPK	5.701.974.000	7	NSPK	5.559.893.866	97,51
1779.AFA.001	1	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan			7 NSPK	5.701.974.000	7	NSPK	5.559.893.866	97,51
	1	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan			7 NSPK	5.701.974.000	7	NSPK	5.559.893.866	97,51
	1	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan			7 NSPK	5.701.974.000	7	NSPK	5.559.893.866	97,51
			1 DKI JAKARTA	1 Provinsi DKI Jakarta	7 NSPK	5.701.974.000	7	NSPK	5.559.893.866	97,51
1779.CAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			61 Unit	6.562.340.000	61	Unit	6.527.015.310	99,46
1779.CAG.001	1	Perangkat Perlindungan Perkebunan			61 Unit	5.221.060.000	61	Unit	5.195.319.600	99,51
	1	Operasional Laboratorium Lapengen (LL)			27 Unit	783.350.000	27	Unit	778.725.700	99,41
	1	Operasional Laboratorium Lapengen (LL)			27 Unit	783.350.000	27	Unit	778.725.700	99,41
			1 JAWA BARAT	1 Provinsi Jawa Barat	1 Unit	29.000.000	1	Unit	29.000.000	100,00
			2 JAWA TENGAH	2 Provinsi Jawa Tengah	1 Unit	29.000.000	1	Unit	28.999.500	100,00
			3 DI YOGYAKARTA	3 Provinsi DI Yogyakarta	1 Unit	31.800.000	1	Unit	31.798.000	99,99
			4 ACEH	4 Provinsi Aceh	1 Unit	33.000.000	1	Unit	32.760.000	99,27
			5 SUMATERA BARAT	5 Provinsi Sumatera Barat	1 Unit	28.650.000	1	Unit	28.500.000	99,48
			6 JAMBI	6 Provinsi Jambi	1 Unit	28.800.000	1	Unit	28.800.000	100,00
			7 SUMATERA SELATAN	7 Provinsi Sumatera Selatan	1 Unit	28.800.000	1	Unit	28.570.000	99,20
			8 LAMPUNG	8 Provinsi Lampung	1 Unit	28.800.000	1	Unit	28.500.000	98,96
			9 KALIMANTAN TENGAH	9 Provinsi Kalimantan Tengah	1 Unit	28.800.000	1	Unit	28.800.000	100,00
			10 KALIMANTAN SELATAN	10 Provinsi Kalimantan Selatan	1 Unit	28.800.000	1	Unit	28.420.000	98,68
			11 KALIMANTAN TIMUR	11 Provinsi Kalimantan Timur	1 Unit	28.800.000	1	Unit	28.403.600	98,62
			12 SULAWESI UTARA	12 Provinsi Sulawesi Utara	1 Unit	30.400.000	1	Unit	30.400.000	100,00
			13 SULAWESI TENGAH	13 Provinsi Sulawesi Tengah	1 Unit	30.400.000	1	Unit	30.400.000	100,00
			14 SULAWESI SELATAN	14 Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit	30.400.000	1	Unit	30.000.000	98,68
			15 SULAWESI TENGGARA	15 Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Unit	27.800.000	1	Unit	27.800.000	100,00
			16 BALI	16 Provinsi Bali	1 Unit	37.000.000	1	Unit	35.374.600	95,61
			17 NUSA TENGGARA BARAT	17 Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Unit	28.800.000	1	Unit	28.800.000	100,00
			18 NUSA TENGGARA TIMUR	18 Kab. Kupang	1 Unit	29.000.000	1	Unit	29.000.000	100,00
			19 NUSA TENGGARA TIMUR	19 Kab. Sikka	1 Unit	26.600.000	1	Unit	26.600.000	100,00
			20 PAPUA	20 Kab. Jayapura	1 Unit	32.000.000	1	Unit	32.000.000	100,00
			21 BENGKULU	21 Provinsi Bengkulu	1 Unit	28.800.000	1	Unit	28.800.000	100,00
			22 BANTEN	22 Provinsi Banten	1 Unit	28.800.000	1	Unit	28.800.000	100,00
			23 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	23 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Unit	43.500.000	1	Unit	43.500.000	100,00
			24 GORONTALO	24 Provinsi Gorontalo	1 Unit	27.800.000	1	Unit	27.800.000	100,00
			25 PAPUA BARAT	25 Provinsi Papua Barat	1 Unit	30.000.000	1	Unit	29.100.000	97,00
			26 SULAWESI BARAT	26 Provinsi Sulawesi Barat	1 Unit	27.800.000	1	Unit	27.800.000	100,00
			27 KALIMANTAN UTARA	27 Provinsi Kalimantan Utara	1 Unit	0	1	Unit	0	

ITI	KODE	KEGIATAN	PROVINSI	KABUPATEN	TARGET		REALISASI			
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		2. Operasional Laboratorium Utama Pengendalian Hama/			3 Unit	90.600.000	3 Unit		90.451.000	99,84
		1. Operasional Laboratorium Utama Pengendalian Hama/			3 Unit	90.600.000	3 Unit		90.451.000	99,84
			1 SULAWESI UTARA	1 Provinsi Sulawesi Utara	1 Unit	30.200.000	1 Unit		30.200.000	100,00
			2 BALI	2 Provinsi Bali	1 Unit	28.400.000	1 Unit		28.251.000	99,48
			3 MALUKU UTARA	3 Provinsi Maluku Utara	1 Unit	32.000.000	1 Unit		32.000.000	100,00
		3. Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT			1.139 Orang	2.955.900.000	1.139 Orang		2.949.658.000	99,79
		1. Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT			1.139 Org	2.955.900.000	1.139 Org		2.949.658.000	99,79
			1 JAWA BARAT	1 Provinsi Jawa Barat	66 Org	174.900.000	66 Org		174.900.000	100,00
			2 JAWA TENGAH	2 Provinsi Jawa Tengah	100 Org	244.800.000	100 Org		244.800.000	100,00
			3 DI YOGYAKARTA	3 Provinsi DI Yogyakarta	30 Org	81.300.000	30 Org		81.300.000	100,00
			4 ACEH	4 Provinsi Aceh	40 Org	106.100.000	40 Org		106.100.000	100,00
			5 SUMATERA BARAT	5 Provinsi Sumatera Barat	56 Org	147.600.000	56 Org		147.600.000	100,00
			6 RIAU	6 Provinsi Riau	66 Org	163.100.000	66 Org		163.100.000	100,00
			7 JAMBI	7 Provinsi Jambi	49 Org	130.500.000	49 Org		130.500.000	100,00
			8 SUMATERA SELATAN	8 Provinsi Sumatera Selatan	74 Org	195.700.000	74 Org		193.215.000	98,73
			9 LAMPUNG	9 Provinsi Lampung	66 Org	177.700.000	66 Org		177.700.000	100,00
			10 KALIMANTAN TENGAH	10 Provinsi Kalimantan Tengah	14 Org	46.800.000	14 Org		46.200.000	98,72
			11 KALIMANTAN SELATAN	11 Provinsi Kalimantan Selatan	28 Org	76.100.000	28 Org		75.576.800	99,31
			12 KALIMANTAN TIMUR	12 Provinsi Kalimantan Timur	21 Org	57.700.000	21 Org		57.700.000	100,00
			13 SULAWESI UTARA	13 Provinsi Sulawesi Utara	77 Org	163.100.000	77 Org		163.100.000	100,00
			14 SULAWESI TENGAH	14 Provinsi Sulawesi Tengah	48 Org	138.600.000	48 Org		138.600.000	100,00
			15 SULAWESI SELATAN	15 Provinsi Sulawesi Selatan	79 Org	207.700.000	79 Org		207.700.000	100,00
			16 SULAWESI TENGGARA	16 Provinsi Sulawesi Tenggara	30 Org	80.100.000	30 Org		80.100.000	100,00
			17 BALI	17 Provinsi Bali	45 Org	135.700.000	45 Org		134.574.800	99,17
			18 NUSA TENGGARA BARAT	18 Provinsi Nusa Tenggara Barat	32 Org	85.700.000	32 Org		85.700.000	100,00
			19 NUSA TENGGARA TIMUR	19 Provinsi Nusa Tenggara Timur	44 Org	115.700.000	44 Org		115.692.400	99,99
			20 PAPUA	20 Provinsi Papua	29 Org	75.300.000	29 Org		75.300.000	100,00
			21 BENGKULU	21 Provinsi Bengkulu	24 Org	64.100.000	24 Org		64.100.000	100,00
			22 MALUKU UTARA	22 Provinsi Maluku Utara	23 Org	17.000.000	23 Org		17.000.000	100,00
			23 BANTEN	23 Provinsi Banten	9 Org	27.300.000	9 Org		27.300.000	100,00
			24 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	24 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	16 Org	44.100.000	16 Org		44.100.000	100,00
			25 GORONTALO	25 Provinsi Gorontalo	15 Org	41.700.000	15 Org		41.700.000	100,00
			26 KEPULAUAN RIAU	26 Provinsi Kepulauan Riau	7 Org	18.000.000	7 Org		17.999.000	99,99
			27 PAPUA BARAT	27 Provinsi Papua Barat	13 Org	36.900.000	13 Org		36.900.000	100,00
			28 SULAWESI BARAT	28 Provinsi Sulawesi Barat	12 Org	34.500.000	12 Org		33.000.000	95,65
			29 KALIMANTAN UTARA	29 Provinsi Kalimantan Utara	26 Org	68.100.000	26 Org		68.100.000	100,00
		4. Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan			31 Unit	1.391.210.000	31 Unit		1.376.484.900	98,94
		1. Operasional Brigade Proteksi Tanaman			31 Unit	1.391.210.000	31 Unit		1.376.484.900	98,94
			1 JAWA BARAT	1 Provinsi Jawa Barat	1 Unit	43.100.000	1 Unit		43.100.000	100,00
			2 JAWA TENGAH	2 Provinsi Jawa Tengah	1 Unit	47.000.000	1 Unit		47.000.000	100,00
			3 DI YOGYAKARTA	3 Provinsi DI Yogyakarta	1 Unit	40.000.000	1 Unit		40.000.000	100,00
			4 ACEH	4 Provinsi Aceh	1 Unit	47.600.000	1 Unit		47.600.000	100,00
			5 SUMATERA BARAT	5 Provinsi Sumatera Barat	1 Unit	45.450.000	1 Unit		45.410.000	99,91
			6 RIAU	6 Provinsi Riau	1 Unit	41.600.000	1 Unit		41.600.000	100,00
			7 JAMBI	7 Provinsi Jambi	1 Unit	41.600.000	1 Unit		41.560.000	99,90
			8 SUMATERA SELATAN	8 Provinsi Sumatera Selatan	1 Unit	41.900.000	1 Unit		41.138.400	98,18
			9 LAMPUNG	9 Provinsi Lampung	1 Unit	41.600.000	1 Unit		41.600.000	100,00
			10 KALIMANTAN TENGAH	10 Provinsi Kalimantan Tengah	1 Unit	45.600.000	1 Unit		45.600.000	100,00
			11 KALIMANTAN SELATAN	11 Provinsi Kalimantan Selatan	1 Unit	42.200.000	1 Unit		40.400.000	95,73
			12 KALIMANTAN TIMUR	12 Provinsi Kalimantan Timur	1 Unit	47.600.000	1 Unit		47.520.000	99,83
			13 SULAWESI UTARA	13 Provinsi Sulawesi Utara	1 Unit	44.200.000	1 Unit		44.200.000	100,00
			14 SULAWESI TENGAH	14 Provinsi Sulawesi Tengah	1 Unit	45.600.000	1 Unit		45.600.000	100,00
			15 SULAWESI SELATAN	15 Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit	41.600.000	1 Unit		41.600.000	100,00
			16 SULAWESI TENGGARA	16 Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Unit	47.800.000	1 Unit		47.800.000	100,00
			17 MALUKU	17 Provinsi Maluku	1 Unit	43.600.000	1 Unit		43.600.000	100,00
			18 BALI	18 Provinsi Bali	1 Unit	41.850.000	1 Unit		41.850.000	100,00
			19 NUSA TENGGARA BARAT	19 Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Unit	41.600.000	1 Unit		41.600.000	100,00
			20 NUSA TENGGARA TIMUR	20 Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Unit	50.400.000	1 Unit		50.400.000	100,00
			21 PAPUA	21 Provinsi Papua	1 Unit	58.600.000	1 Unit		58.600.000	100,00

ITI	KODE	KEGIATAN	PROVINSI	KABUPATEN	TARGET		REALISASI			
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME		ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			22 BENGKULU	22 Provinsi Bengkulu	1 Unit	43.100.000	1 Unit		43.100.000	100,00
			23 MALUKU UTARA	23 Provinsi Maluku Utara	1 Unit	48.100.000	1 Unit		48.100.000	100,00
			24 BANTEN	24 Provinsi Banten	1 Unit	43.100.000	1 Unit		43.075.000	99,94
			25 KEPULAUAN BANGKA BELITU	25 PROVINSI KABUPATEN BANGKA Belitung	1 Unit	49.660.000	1 Unit		49.660.000	100,00
			26 GORONTALO	26 Provinsi Gorontalo	1 Unit	41.700.000	1 Unit		41.600.000	99,76
			27 KEPULAUAN RIAU	27 Provinsi Kepulauan Riau	1 Unit	26.300.000	1 Unit		25.626.500	97,44
			28 PAPUA BARAT	28 Provinsi Papua Barat	1 Unit	60.150.000	1 Unit		57.150.000	95,01
			29 SULAWESI BARAT	29 Provinsi Sulawesi Barat	1 Unit	45.800.000	1 Unit		45.695.000	99,77
			30 BBP2TP SURABAYA	30 BBP2TP SURABAYA	1 Unit	49.700.000	1 Unit		48.830.000	98,25
			31 BBP2TP MEDAN	31 BBP2TP MEDAN	1 Unit	43.100.000	1 Unit		35.870.000	83,23
	1779.CAG.002	2 Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan			15 Paket Teknologi	1.341.280.000	15 Paket Teknologi		1.331.695.710	99,29
		5 Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan			15 Paket Teknologi	1.341.280.000	15 Paket Teknologi		1.331.695.710	99,29
		1 Teknologi Pengendalian OPT Perkebunan			15 Pkt T	1.341.280.000	15 Pkt T		1.331.695.710	99,29
			1 BBP2TP SURABAYA	1 BBP2TP SURABAYA	2 Pkt T	348.550.000	2 Pkt T		343.754.700	98,64
			2 BBP2TP MEDAN	2 BBP2TP MEDAN	5 Pkt T	302.275.000	5 Pkt T		301.776.510	99,84
			3 BBP2TP AMBON	3 BBP2TP AMBON	5 Pkt T	387.075.000	5 Pkt T		387.003.000	99,98
			4 BPTP PONTIANAK	4 BPTP PONTIANAK	3 Pkt T	303.380.000	3 Pkt T		299.121.500	98,60
	1779.PDC	Sertifikasi Produk			Produk	5.580.459.000	Produk		5.549.971.456	99,45
	1779.PDC.001	1 Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan			48 Desa	5.580.459.000	48 Desa		5.549.971.456	99,45
		1 Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan			48 Desa	5.580.459.000	48 Desa		5.549.971.456	99,45
		1 Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan			48 Desa	5.580.459.000	48 Desa		5.549.971.456	99,45
			1 JAWA BARAT	1 Provinsi	7 Desa	676.050.000	7 Desa		675.770.000	99,96
			2 JAWA TENGAH	2 Provinsi	7 Desa	696.100.000	7 Desa		694.773.000	99,81
			3 DI YOGYAKARTA	3 Provinsi	3 Desa	278.550.000	3 Desa		278.545.460	100,00
			4 SUMBAR	4 Provinsi	1 Desa	246.650.000	1 Desa		237.922.661	96,46
			5 JAMBI	5 Provinsi	2 Desa	406.150.000	2 Desa		404.337.900	99,55
			6 SUMATERA SELATAN	6 Provinsi	2 Desa	284.700.000	2 Desa		283.305.949	99,51
			7 BALI	7 Provinsi	3 Desa	328.500.000	3 Desa		325.548.201	99,10
			8 NTB	8 Provinsi	3 Desa	314.200.000	3 Desa		307.657.500	97,92
			9 BANTEN	9 Provinsi	4 Desa	242.550.000	4 Desa		242.479.000	99,97
			10 BBP2TP SURABAYA	10 BBP2TP SURABAYA	13 Desa	1.629.209.000	13 Desa		1.628.890.624	99,98
			11 BBP2TP MEDAN	11 BBP2TP MEDAN	3 Desa	477.800.000	3 Desa		470.741.161	98,52

ITI	KODE	KEGIATAN	PROVINSI	KABUPATEN	TARGET		REALISASI			
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN		%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1779.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			Kelompok Masyarakat	200.000.000		Kelompok Masyarakat	200.000.000	100,00
	1779.QDD.001	1 Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan			3 Kasus	200.000.000	3 Kasus		200.000.000	100,00
		1 Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan			3 Kasus	200.000.000	3 Kasus		200.000.000	100,00
		1 Fasilitas, Inventarisasi, Identifikasi, serta Penanganan Kasus Gangguan Usaha Perkebunan			3 Kasus	200.000.000	3 Kasus		200.000.000	100,00
			1 BENGKULU	1 Provinsi Bengkulu	3 Kasus	200.000.000	3 Kasus		200.000.000	100,00
	1779.RAJ	Sarana Pengembangan Kawasan			Unit	63.511.973.000	Unit		63.799.597.701	98,88
	1779.RAJ.001	1 Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun			701 Ha	13.448.279.000	701 Ha		12.814.697.831	95,29
		1 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			120 Ha	4.141.920.000	120 Ha		3.652.565.005	88,19
		1 Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim			120 Ha	2.141.920.000	120 Ha		2.103.430.920	98,20
			1 JAWA BARAT	1 Provinsi Jawa Barat	20 Ha	359.195.000	20 Ha		356.636.000	99,29
			2 JAWA TENGAH	2 Provinsi Jawa Tengah	20 Ha	360.075.000	20 Ha		358.561.500	99,58
			3 DI YOGYAKARTA	3 Provinsi DI Yogyakarta	20 Ha	346.525.000	20 Ha		345.279.700	99,64
			4 BALI	4 Provinsi Bali	20 Ha	358.575.000	20 Ha		349.349.120	97,43
			5 NUSA TENGGARA BARAT	5 Provinsi Nusa Tenggara Barat	20 Ha	359.225.000	20 Ha		335.398.300	93,37
			6 BBPPTP SURABAYA	6 BBPPTP SURABAYA	20 Ha	358.325.000	20 Ha		358.206.300	99,97
		2 Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim (BIOCH-1500)			1 Kkg	2.000.000.000	1 Kkg		1.549.134.085	77,46
			1 DKI Jakarta	1 Provinsi DKI Jakarta	1 Kkg	2.000.000.000	1 Kkg		1.549.134.085	77,46
		2 Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun			481 Ha	7.027.909.000	481 Ha		6.911.887.756	98,35
		1 Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun			480 Ha	1.481.409.000	480 Ha		1.454.281.298	98,17
			1 RIAU	1 Provinsi Riau	90 Ha	254.500.000	90 Ha		253.127.830	99,46
			2 JAMBI	2 Provinsi Jambi	90 Ha	274.500.000	90 Ha		273.918.400	99,79
			3 SUMATERA SELATAN	3 Provinsi Sumatera Selatan	90 Ha	269.500.000	90 Ha		269.411.950	99,97
			4 KALIMANTAN TENGAH	4 Provinsi Kalimantan Tengah	90 Ha	274.500.000	90 Ha		274.445.000	99,98
			5 KALIMANTAN SELATAN	5 Provinsi Kalimantan Selatan	60 Ha	192.809.000	60 Ha		168.019.668	87,14
			6 KALIMANTAN TIMUR	6 Provinsi Kalimantan Timur	60 Ha	215.600.000	60 Ha		215.358.450	99,89
		1 Sarana Penanggulangan Kebakaran Lahan Perkebunan			1 Ha	5.546.500.000	1 Ha		5.457.606.458	98,40
			1 DKI JAKARTA	1 DKI Jakarta	1 Ha	5.546.500.000	1 Ha		5.457.606.458	98,40
		3 Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan tanpa Membakar			100 Ha	2.278.450.000	100 Ha		2.250.245.070	98,76
		1 Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan tanpa Membakar			100 Ha	2.278.450.000	100 Ha		2.250.245.070	98,76
			1 JAMBI	1 Provinsi Jambi	25 Ha	569.600.000	25 Ha		567.966.150	99,71
			2 SUMATERA SELATAN	2 Provinsi Sumatera Selatan	25 Ha	569.600.000	25 Ha		561.774.001	98,63
			3 KALIMANTAN TENGAH	3 Provinsi Kalimantan Tengah	25 Ha	569.650.000	25 Ha		562.808.000	98,80
			4 KALIMANTAN SELATAN	4 Provinsi Kalimantan Selatan	25 Ha	569.600.000	25 Ha		557.696.919	97,91
	1779.RAJ.002	2 Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan			11.631 Ha	50.063.694.000	11.631 Ha		49.984.899.870	99,84
		5 Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar			5.156 Ha	25.986.733.000	5.156 Ha		25.948.464.791	99,85
		1 Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Kakao			200 Ha	493.600.000	200 Ha		493.188.008	99,92
			1 DI YOGYAKARTA	1 Kab. Kulon Progo	50 Ha	125.550.000	50 Ha		125.280.558	99,79
			3 SULAWESI SELATAN	3 Kab. Bone	50 Ha	134.550.000	50 Ha		134.407.450	99,89
			5 NUSA TENGGARA BARAT	5 Kab. Lombok Utara	50 Ha	130.050.000	50 Ha		130.050.000	100,00
			6 GORONTALO	6 Kab. Boalemo	50 Ha	103.450.000	50 Ha		103.450.000	100,00

ITI	KODE	KEGIATAN	PROVINSI	KABUPATEN	TARGET			REALISASI			
					VOLUME		ANGGARAN	VOLUME		ANGGARAN	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		2. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Kopi			150	Ha	225.150.000	150	Ha	224.411.956	99,67
			1 BENGKULU	1 Kab. Kepahiang	50	Ha	105.700.000	50	Ha	105.477.650	99,79
			2 JAWA TENGAH	2 Kab. Temanggung	50	Ha	11.500.000	50	Ha	11.480.000	99,83
			4 BBP2TP MEDAN	4 Kab. Toba	50	Ha	107.950.000	50	Ha	107.454.306	99,54
		3. Pengendalian OPT Tanaman Karet			75	Ha	137.937.000	75	Ha	130.117.000	94,33
			1 JAMBI	1 Kab. Betenghari	50	Ha	84.787.000	50	Ha	84.487.000	99,65
			2 SUMATERA SELATAN	2 Kab. Musi Banyuasin	25	Ha	53.150.000	25	Ha	45.630.000	85,85
		4. Pengendalian OPT Tanaman Kelapa			100	Ha	225.687.000	100	Ha	224.887.000	99,65
			1 JAWA BARAT	1 Kab. Pangandaran	50	Ha	123.462.000	50	Ha	122.662.000	99,35
			2 SULAWESI UTARA	2 Kab. Minahasa Selatan	50	Ha	102.225.000	50	Ha	102.225.000	100,00
		5. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati			4.631	Ha	24.904.359.000	4.631	Ha	24.875.860.827	99,89
			1 DKI Jakarta	1 DKI Jakarta	4.631	Ha	24.904.359.000	4.631	Ha	24.875.860.827	99,89
		6. Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah			6.475	Ha	24.076.961.000	6.475	Ha	24.036.435.079	99,83
		1. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada			200	Ha	628.500.000	200	Ha	621.339.360	98,86
			2 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	2 Kab. Bangka Selatan	100	Ha	263.350.000	100	Ha	263.250.000	99,96
			3 BBTP PONTIANAK	3 Kab. Bengkayang	100	Ha	265.150.000	100	Ha	264.436.400	99,73
		2. Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Cengkeh			150	Ha	281.550.000	150	Ha	273.754.000	97,23
			1 JAWA TENGAH	1 Kab. Batang	50	Ha	73.150.000	50	Ha	72.950.000	99,73
			2 BALI	2 Kab. Buleleng	100	Ha	208.400.000	100	Ha	200.804.000	96,36
		3. Pengendalian OPT Tanaman Tebu			100	Ha	252.950.000	100	Ha	252.290.000	99,74
			3 DI YOGYAKARTA	3 Kab. Sleman		Ha	17.100.000		Ha	17.100.000	100,00
			5 BBP2TP SURABAYA	5 Kab. Kediri	100	Ha	235.850.000	100	Ha	235.190.000	99,72
		4. Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati			6.025	Ha	22.913.961.000	6.025	Ha	22.889.051.719	99,89
			1 DKI Jakarta	1 DKI Jakarta	6.025	Ha	22.913.961.000	6.025	Ha	22.889.051.719	99,89
		11. Pengawasan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (BBTP) Tanaman Perkebunan			1	Kegiatan	168.000.000	1	Kegiatan	166.955.794	99,38
			1 DKI JAKARTA	1 DKI JAKARTA	1	Kegiatan	168.000.000	1	Kegiatan	166.955.794	99,38



**LAPORAN SURVEI KEPUASAN PEGAWAI LINGKUP DITLINBUN
TERHADAP PELAYANAN DI SUB BAGIAN TATA USAHA
DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN TAHUN 2022**

DESEMBER 2022

**DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa, barang, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat mutu pelayanan. Di samping itu, data indeks kepuasan masyarakat dijadikan bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanannya.

Dasar hukum pelaksanaan survey Indeks Kepuasan Masyarakat adalah:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/PERMENTAN/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian

B. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data tingkat kepuasan masyarakat melalui survei kepada pegawai lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan terhadap pelayanan publik pada sub bagian tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

Adapun tujuan pembuatan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada unit kerja sub bagian tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah untuk mengukur tingkat kepuasan lingkup pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas sub bagian tata usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan.

C. Metode IKM

Survei Kepuasan Masyarakat menggunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Dalam melakukan survey secara periodik dipergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala *likert*. Skala likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Survei IKM menggunakan alat bantu berupa kuesioner yang dibagikan kepada pegawai lingkup ditlinbun pengguna layanan sebagai responden secara langsung, dalam Survei IKM ini pertanyaan kuesioner meliputi 10 (sepuluh) unsur, yaitu:

1. Keramahan dan kepedulian pelayanan
2. Kecepatan waktu pelayanan
3. Kenyamanan pelayanan
4. Penampilan/kerapihan pelayanan pelayanan
5. Kualitas pelayanan

6. Kepuasan terhadap informasi yang diberikan
7. Pelayanan sarana dan prasarana
8. Pelayanan kepegawaian
9. Pelayanan keuangan
10. Profesionalisme pelayanan

a. Kuesioner

Kuesioner terdiri dari 3 bagian yaitu :

1. Bagian I terdiri dari Identitas pencacah meliputi tanggal pengisian kuesioner.
2. Bagian II terdiri dari Identitas responden meliputi jenis kelamin dan pendidikan terakhir.
3. Bagian III terdiri dari mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

b. Bentuk Jawaban

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai dengan tidak baik, dengan persepsi sebagai berikut :

Angka 1	Adalah persepsi tidak baik
Angka 2	Adalah nilai persepsi kurang baik
Angka 3	Adalah nilai persepsi baik
Angka 4	Adalah nilai persepsi sangat baik

c. Responden

Pegawai Direktorat Perlindungan Perkebunan yang telah menerima pelayanan dari Subbag Tata Usaha secara langsung pada Semester 2 tahun 2022 yaitu sebanyak 42 orang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Kelompok GUDPIPK	10 Orang
2	Kelompok Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah	12 Orang
3	Kelompok Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar	10 Orang
4	Kelompok Data dan Kelembagaan Pengendalian OPT	10 Orang

BAB II ANALISIS

Kegiatan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di sub bagian tata usaha ditlinbun memberikan kuesioner dalam bentuk pilihan. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 survei menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengukuran Skala Likert yaitu suatu skala prikometrik yang umum digunakan dalam kuisisioner dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam survei. Kategori pengukuran IKM menurut Permenpan dan RB tersebut terdiri dari 4 kriteria, yaitu :

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Pengambilan data dimulai selama Semester 2 (Juli-Desember) tahun 2022. Data yang didapatkan dianalisa dan hasil analisa dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan layanan pada publikasi. Hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Perlindungan Perkebunan adalah BAIK dengan nilai Indeks rata-rata Kepuasan Masyarakat 87,92 atau skala 3,52, hasil penghitungan seperti pada Lampiran.

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PELAYANAN KETATAUSAHAAN DIREKTORAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN KEMENTERIAN PERTANIAN
JULI S.D DESEMBER TAHUN 2022

NILAI IKM	NAMA LAYANAN :
87,92	Jumlah : 42 Orang Jenis Kelamin : L = 20 Orang / P = 22 Orang Pendidikan : SD = 0 Orang : SMP = 0 Orang : SMA = 1 Orang SMT/SMK Pertanian = 0 Orang D1 Perlinbun = 0 Orang : D3 = 0 Orang : S1 = 24 Orang : S2 = 17 Orang
SKALA	Periode Survei Juli s.d Desember 2022
3,52	

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN
MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT BAGI UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI
DAN MENINGKATKAN KUALITAS BAGI PELAYANAN MASYARAKAT

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pelayanan di sub bagian tata usaha pada ditlinbun tahun 2022 berada pada kategori BAIK dengan nilai IKM 87,92 atau skala 3,52.
2. Survei kepuasan ini perlu dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayan di sub bagian tata usaha ditlinbun.

B. Tindak Lanjut

Memaksimalkan pelayanan di sub bagian tata usaha di lingkup ditlinbun.

No.	NILAI UNSUR PELAYANAN										
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	
1	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	
19	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	
23	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	
28	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
29	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
34	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
36	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	
37	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	
38	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	
39	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	
40	4	4	4	3	4	3	3	4	4	3	
41	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	
42	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	
ΣNilai/Unsur	152	149	149	144	150	145	147	143	153	145	
NRR/Unsur	3,62	3,55	3,55	3,43	3,57	3,45	3,50	3,40	3,64	3,45	3,52
NRR tertimbang/Unsur	0,36	0,35	0,35	0,34	0,36	0,35	0,35	0,34	0,36	0,35	0,35
IKM Ketatausahaan											87,92

No.	Unsur Pelayanan	Nilai rata - rata	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
U1	Keramahan dan kepedulian pelayanan	3,62	90,48	A	Sangat baik
U2	Kecepatan waktu pelayanan	3,55	88,69	A	Sangat baik
U3	Kenyamanan pelayanan	3,55	88,69	A	Sangat baik
U4	Penampilan/kerapihan pelayanan	3,43	85,71	B	Baik
U5	Kualitas pelayanan	3,57	89,29	A	Sangat baik
U6	Kepuasan terhadap informasi yang diberikan	3,45	86,31	B	Baik
U7	Pelayanan sarana dan prasarana	3,50	87,50	B	Baik
U8	Pelayanan kepegawaian	3,40	85,12	B	Baik
U9	Pelayanan keuangan	3,64	91,07	A	Sangat baik
U10	Profesionalisme pelayanan	3,45	86,31	B	Baik
TOTAL		3,52	87,92	B	Baik

Lampiran 6. Pengukuran Nilai Efisiensi

Untuk mengukur efisiensi (E) digunakan formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK \text{ ke } i / RVK \text{ ke } i}{PAK \text{ ke } i / TVK \text{ ke } i} \right) \times 100\%}{n}$$

Sedangkan untuk mengukur nilai efisiensi (NE) digunakan formula berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

Lampiran 7. Realisasi Keuangan Kegiatan Penguatan Perlindungan Perkebunan Pusat dan Daerah Tahun 2022

ITI	KODE	KEGIATAN	PROVINSI	KABUPATEN	TARGET		REALISASI			
					VOLUME		ANGGARAN		VOLUME	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		DITJEN PERKEBUNAN				76.948.382.000			76.061.510.872	98,85
		Ditjen Perkebunan				76.948.382.000			76.061.510.872	98,85
		Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				76.948.382.000			76.061.510.872	98,85
1779		Penguatan Perlindungan Perkebunan				76.948.382.000			76.061.510.872	98,85
1779.AFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			7 NSPK	5.701.974.000	7 NSPK		5.559.893.866	97,51
1779.AFA.001	1	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan			7 NSPK	5.701.974.000	7 NSPK		5.559.893.866	97,51
	1	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan			7 NSPK	5.701.974.000	7 NSPK		5.559.893.866	97,51
	1	Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan			7 NSPK	5.701.974.000	7 NSPK		5.559.893.866	97,51
			1 DKI JAKARTA	1 Provinsi DKI Jakarta	7 NSPK	5.701.974.000	7 NSPK		5.559.893.866	97,51
1779.CAG		Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup			61 Unit	5.128.260.000	61 Unit		5.110.619.600	99,66
1779.CAG.001	1	Perangkat Perlindungan Perkebunan			61 Unit	5.128.260.000	61 Unit		5.110.619.600	99,66
	1	Operasional Laboratorium Lapangan (LL)			27 Unit	783.350.000	27 Unit		778.725.700	99,41
	1	Operasional Laboratorium Lapangan (LL)			27 Unit	783.350.000	27 Unit		778.725.700	99,41
			1 JAWA BARAT	1 Provinsi Jawa Barat	1 Unit	29.000.000	1 Unit		29.000.000	100,00
			2 JAWA TENGAH	2 Provinsi Jawa Tengah	1 Unit	29.000.000	1 Unit		28.999.500	100,00
			3 DI YOGYAKARTA	3 Provinsi DI Yogyakarta	1 Unit	31.800.000	1 Unit		31.798.000	99,99
			4 ACEH	4 Provinsi Aceh	1 Unit	33.000.000	1 Unit		32.760.000	99,27
			5 SUMATERA BARAT	5 Provinsi Sumatera Barat	1 Unit	28.650.000	1 Unit		28.500.000	99,48
			6 JAMBI	6 Provinsi Jambi	1 Unit	28.800.000	1 Unit		28.800.000	100,00
			7 SUMATERA SELATAN	7 Provinsi Sumatera Selatan	1 Unit	28.800.000	1 Unit		28.570.000	99,20
			8 LAMPUNG	8 Provinsi Lampung	1 Unit	28.800.000	1 Unit		28.500.000	98,96
			9 KALIMANTAN TENGAH	9 Provinsi Kalimantan Tengah	1 Unit	28.800.000	1 Unit		28.800.000	100,00
			10 KALIMANTAN SELATAN	10 Provinsi Kalimantan Selatan	1 Unit	28.800.000	1 Unit		28.420.000	98,68
			11 KALIMANTAN TIMUR	11 Provinsi Kalimantan Timur	1 Unit	28.800.000	1 Unit		28.403.600	98,62
			12 SULAWESI UTARA	12 Provinsi Sulawesi Utara	1 Unit	30.400.000	1 Unit		30.400.000	100,00
			13 SULAWESI TENGAH	13 Provinsi Sulawesi Tengah	1 Unit	30.400.000	1 Unit		30.400.000	100,00
			14 SULAWESI SELATAN	14 Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit	30.400.000	1 Unit		30.000.000	98,68
			15 SULAWESI TENGGARA	15 Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Unit	27.800.000	1 Unit		27.800.000	100,00
			16 BALI	16 Provinsi Bali	1 Unit	37.000.000	1 Unit		35.374.600	95,61
			17 NUSA TENGGARA BARAT	17 Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Unit	28.800.000	1 Unit		28.800.000	100,00
			18 NUSA TENGGARA TIMUR	18 Kab. Kupang	1 Unit	29.000.000	1 Unit		29.000.000	100,00
			19 NUSA TENGGARA TIMUR	19 Kab. Sikka	1 Unit	26.600.000	1 Unit		26.600.000	100,00
			20 PAPUA	20 Kab. Jayapura	1 Unit	32.000.000	1 Unit		32.000.000	100,00
			21 BENGKULU	21 Provinsi Bengkulu	1 Unit	28.800.000	1 Unit		28.800.000	100,00
			22 BANTEN	22 Provinsi Banten	1 Unit	28.800.000	1 Unit		28.800.000	100,00
			23 KEPULAUAN BANGKA BELITU	23 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Unit	43.500.000	1 Unit		43.500.000	100,00
			24 GORONTALO	24 Provinsi Gorontalo	1 Unit	27.800.000	1 Unit		27.800.000	100,00
			25 PAPUA BARAT	25 Provinsi Papua Barat	1 Unit	30.000.000	1 Unit		29.100.000	97,00
			26 SULAWESI BARAT	26 Provinsi Sulawesi Barat	1 Unit	27.800.000	1 Unit		27.800.000	100,00
			27 KALIMANTAN UTARA	27 Provinsi Kalimantan Utara	1 Unit	0	1 Unit		0	

ITI	KODE	KEGIATAN	PROVINSI	KABUPATEN	TARGET		REALISASI			
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		2 Operasional Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH)			3 Unit	90.600.000	3 Unit		90.451.000	99,84
		1 Operasional Laboratorium Utama Pengendalian Hayati (LUPH)			3 Unit	90.600.000	3 Unit		90.451.000	99,84
			1 SULAWESI UTARA	1 Provinsi Sulawesi Utara	1 Unit	30.200.000	1 Unit		30.200.000	100,00
			2 BALI	2 Provinsi Bali	1 Unit	28.400.000	1 Unit		28.251.000	99,48
			3 MALUKU UTARA	3 Provinsi Maluku Utara	1 Unit	32.000.000	1 Unit		32.000.000	100,00
		3 Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT			1.139 Orang	2.955.900.000	1.139 Orang		2.949.658.000	99,79
		1 Pemberdayaan Petugas Pengamat OPT			1.139 Org	2.955.900.000	1.139 Org		2.949.658.000	99,79
			1 JAWA BARAT	1 Provinsi Jawa Barat	66 Org	174.900.000	66 Org		174.900.000	100,00
			2 JAWA TENGAH	2 Provinsi Jawa Tengah	100 Org	244.800.000	100 Org		244.800.000	100,00
			3 DI YOGYAKARTA	3 Provinsi DI Yogyakarta	30 Org	81.300.000	30 Org		81.300.000	100,00
			4 ACEH	4 Provinsi Aceh	40 Org	106.100.000	40 Org		106.100.000	100,00
			5 SUMATERA BARAT	5 Provinsi Sumatera Barat	56 Org	147.600.000	56 Org		147.600.000	100,00
			6 RIAU	6 Provinsi Riau	66 Org	163.100.000	66 Org		163.100.000	100,00
			7 JAMBI	7 Provinsi Jambi	49 Org	130.500.000	49 Org		130.500.000	100,00
			8 SUMATERA SELATAN	8 Provinsi Sumatera Selatan	74 Org	195.700.000	74 Org		193.215.000	98,73
			9 LAMPUNG	9 Provinsi Lampung	66 Org	177.700.000	66 Org		177.700.000	100,00
			10 KALIMANTAN TENGAH	10 Provinsi Kalimantan Tengah	14 Org	46.800.000	14 Org		46.200.000	98,72
			11 KALIMANTAN SELATAN	11 Provinsi Kalimantan Selatan	28 Org	76.100.000	28 Org		75.576.800	99,31
			12 KALIMANTAN TIMUR	12 Provinsi Kalimantan Timur	21 Org	57.700.000	21 Org		57.700.000	100,00
			13 SULAWESI UTARA	13 Provinsi Sulawesi Utara	77 Org	163.100.000	77 Org		163.100.000	100,00
			14 SULAWESI TENGAH	14 Provinsi Sulawesi Tengah	48 Org	138.600.000	48 Org		138.600.000	100,00
			15 SULAWESI SELATAN	15 Provinsi Sulawesi Selatan	79 Org	207.700.000	79 Org		207.700.000	100,00
			16 SULAWESI TENGGARA	16 Provinsi Sulawesi Tenggara	30 Org	80.100.000	30 Org		80.100.000	100,00
			17 BALI	17 Provinsi Bali	45 Org	135.700.000	45 Org		134.574.800	99,17
			18 NUSA TENGGARA BARAT	18 Provinsi Nusa Tenggara Barat	32 Org	85.700.000	32 Org		85.700.000	100,00
			19 NUSA TENGGARA TIMUR	19 Provinsi Nusa Tenggara Timur	44 Org	115.700.000	44 Org		115.692.400	99,99
			20 PAPUA	20 Provinsi Papua	29 Org	75.300.000	29 Org		75.300.000	100,00
			21 BENGKULU	21 Provinsi Bengkulu	24 Org	64.100.000	24 Org		64.100.000	100,00
			22 MALUKU UTARA	22 Provinsi Maluku Utara	23 Org	17.000.000	23 Org		17.000.000	100,00
			23 BANTEN	23 Provinsi Banten	9 Org	27.300.000	9 Org		27.300.000	100,00
			24 KEPULAUAN BANGKA BELITU	24 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	16 Org	44.100.000	16 Org		44.100.000	100,00
			25 GORONTALO	25 Provinsi Gorontalo	15 Org	41.700.000	15 Org		41.700.000	100,00
			26 KEPULAUAN RIAU	26 Provinsi Kepulauan Riau	7 Org	18.000.000	7 Org		17.999.000	99,99
			27 PAPUA BARAT	27 Provinsi Papua Barat	13 Org	36.900.000	13 Org		36.900.000	100,00
			28 SULAWESI BARAT	28 Provinsi Sulawesi Barat	12 Org	34.500.000	12 Org		33.000.000	95,65
			29 KALIMANTAN UTARA	29 Provinsi Kalimantan Utara	26 Org	68.100.000	26 Org		68.100.000	100,00
		4 Operasional Brigade Proteksi Tanaman Perkebunan			31 Unit	1.298.410.000	31 Unit		1.291.784.900	99,49
		1 Operasional Brigade Proteksi Tanaman			31 Unit	1.298.410.000	31 Unit		1.291.784.900	99,49
			1 JAWA BARAT	1 Provinsi Jawa Barat	1 Unit	43.100.000	1 Unit		43.100.000	100,00
			2 JAWA TENGAH	2 Provinsi Jawa Tengah	1 Unit	47.000.000	1 Unit		47.000.000	100,00
			3 DI YOGYAKARTA	3 Provinsi DI Yogyakarta	1 Unit	40.000.000	1 Unit		40.000.000	100,00
			4 ACEH	4 Provinsi Aceh	1 Unit	47.600.000	1 Unit		47.600.000	100,00
			5 SUMATERA BARAT	5 Provinsi Sumatera Barat	1 Unit	45.450.000	1 Unit		45.410.000	99,91
			6 RIAU	6 Provinsi Riau	1 Unit	41.600.000	1 Unit		41.600.000	100,00
			7 JAMBI	7 Provinsi Jambi	1 Unit	41.600.000	1 Unit		41.560.000	99,90
			8 SUMATERA SELATAN	8 Provinsi Sumatera Selatan	1 Unit	41.900.000	1 Unit		41.138.400	98,18
			9 LAMPUNG	9 Provinsi Lampung	1 Unit	41.600.000	1 Unit		41.600.000	100,00
			10 KALIMANTAN TENGAH	10 Provinsi Kalimantan Tengah	1 Unit	45.600.000	1 Unit		45.600.000	100,00

ITI	KODE	KEGIATAN	PROVINSI	KABUPATEN	TARGET		REALISASI			
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			11 KALIMANTAN SELATAN	11 Provinsi Kalimantan Selatan	1 Unit	42.200.000	1 Unit		40.400.000	95,73
			12 KALIMANTAN TIMUR	12 Provinsi Kalimantan Timur	1 Unit	47.600.000	1 Unit		47.520.000	99,83
			13 SULAWESI UTARA	13 Provinsi Sulawesi Utara	1 Unit	44.200.000	1 Unit		44.200.000	100,00
			14 SULAWESI TENGAH	14 Provinsi Sulawesi Tengah	1 Unit	45.600.000	1 Unit		45.600.000	100,00
			15 SULAWESI SELATAN	15 Provinsi Sulawesi Selatan	1 Unit	41.600.000	1 Unit		41.600.000	100,00
			16 SULAWESI TENGGARA	16 Provinsi Sulawesi Tenggara	1 Unit	47.800.000	1 Unit		47.800.000	100,00
			17 MALUKU	17 Provinsi Maluku	1 Unit	43.600.000	1 Unit		43.600.000	100,00
			18 BALI	18 Provinsi Bali	1 Unit	41.850.000	1 Unit		41.850.000	100,00
			19 NUSA TENGGARA BARAT	19 Provinsi Nusa Tenggara Barat	1 Unit	41.600.000	1 Unit		41.600.000	100,00
			20 NUSA TENGGARA TIMUR	20 Provinsi Nusa Tenggara Timur	1 Unit	50.400.000	1 Unit		50.400.000	100,00
			21 PAPUA	21 Provinsi Papua	1 Unit	58.600.000	1 Unit		58.600.000	100,00
			22 BENGKULU	22 Provinsi Bengkulu	1 Unit	43.100.000	1 Unit		43.100.000	100,00
			23 MALUKU UTARA	23 Provinsi Maluku Utara	1 Unit	48.100.000	1 Unit		48.100.000	100,00
			24 BANTEN	24 Provinsi Banten	1 Unit	43.100.000	1 Unit		43.075.000	99,94
			25 KEPULAUAN BANGKA BELITU	25 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1 Unit	49.660.000	1 Unit		49.660.000	100,00
			26 GORONTALO	26 Provinsi Gorontalo	1 Unit	41.700.000	1 Unit		41.600.000	99,76
			27 KEPULAUAN RIAU	27 Provinsi Kepulauan Riau	1 Unit	26.300.000	1 Unit		25.626.500	97,44
			28 PAPUA BARAT	28 Provinsi Papua Barat	1 Unit	60.150.000	1 Unit		57.150.000	95,01
			29 SULAWESI BARAT	29 Provinsi Sulawesi Barat	1 Unit	45.800.000	1 Unit		45.695.000	99,77
	1779.PDC	Sertifikasi Produk			Produk	3.473.450.000	Produk		3.450.339.671	99,33
	1779.PDC.001	1 Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan			48 Desa	3.473.450.000	48 Desa		3.450.339.671	99,33
		1 Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan			48 Desa	3.473.450.000	48 Desa		3.450.339.671	99,33
		1 Pembinaan dan Sertifikasi Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditi Perkebunan			48 Desa	3.473.450.000	48 Desa		3.450.339.671	99,33
			1 JAWA BARAT	1 Provinsi	7 Desa	676.050.000	7 Desa		675.770.000	99,96
			2 JAWA TENGAH	2 Provinsi	7 Desa	696.100.000	7 Desa		694.773.000	99,81
			3 DI YOGYAKARTA	3 Provinsi	3 Desa	278.550.000	3 Desa		278.545.460	100,00
			4 SUMBAR	4 Provinsi	1 Desa	246.650.000	1 Desa		237.922.661	96,46
			5 JAMBI	5 Provinsi	2 Desa	406.150.000	2 Desa		404.337.900	99,55
			6 SUMATERA SELATAN	6 Provinsi	2 Desa	284.700.000	2 Desa		283.305.949	99,51
			7 BALI	7 Provinsi	3 Desa	328.500.000	3 Desa		325.548.201	99,10
			8 NTB	8 Provinsi	3 Desa	314.200.000	3 Desa		307.657.500	97,92
			9 BANTEN	9 Provinsi	4 Desa	242.550.000	4 Desa		242.479.000	99,97
	1779.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat			Kelompok Masyarakat	200.000.000	Kelompok Masyarakat		200.000.000	100,00
	1779.QDD.001	1 Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan			3 Kasus	200.000.000	3 Kasus		200.000.000	100,00
		1 Penanganan Gangguan dan Konflik Usaha Perkebunan			3 Kasus	200.000.000	3 Kasus		200.000.000	100,00
		1 Fasilitasi, Inventarisasi, Identifikasi, serta Penanganan Kasus Gangguan Usaha Perkebunan			3 Kasus	200.000.000	3 Kasus		200.000.000	100,00
			1 BENGKULU	1 Provinsi Bengkulu	3 Kasus	200.000.000	3 Kasus		200.000.000	100,00

ITI	KODE	KEGIATAN	PROVINSI	KABUPATEN	TARGET		REALISASI			
					VOLUME	ANGGARAN	VOLUME	ANGGARAN	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	1779.RAI	Sarana Pengembangan Kawasan			Unit	62.444.698.000	Unit		61.740.657.735	98,87
	1779.RAI.001	1 Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun			701 Ha	13.089.954.000	701 Ha		12.456.491.531	95,16
		1 Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim			120 Ha	3.783.595.000	120 Ha		3.294.358.705	87,07
		1 Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim			120 Ha	1.783.595.000	120 Ha		1.745.224.620	97,85
			1 JAWA BARAT	1 Provinsi Jawa Barat	20 Ha	359.195.000	20 Ha		356.636.000	99,29
			2 JAWA TENGAH	2 Provinsi Jawa Tengah	20 Ha	360.075.000	20 Ha		358.561.500	99,58
			3 DI YOGYAKARTA	3 Provinsi DI Yogyakarta	20 Ha	346.525.000	20 Ha		345.279.700	99,64
			4 BALI	4 Provinsi Bali	20 Ha	358.575.000	20 Ha		349.349.120	97,43
			5 NUSA TENGGARA BARAT	5 Provinsi Nusa Tenggara Barat	20 Ha	359.225.000	20 Ha		335.398.300	93,37
		2 Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim (BROOD-ING)			1 Keg	2.000.000.000	1 Keg		1.549.134.085	77,46
			1 DKI Jakarta	1 Provinsi DKI Jakarta	1 Keg	2.000.000.000	1 Keg		1.549.134.085	77,46
		2 Operasional brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun			481 Ha	7.027.909.000	481 Ha		6.911.887.756	98,35
		1 Operasional brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun			480 Ha	1.481.409.000	480 Ha		1.454.281.298	98,17
			1 RIAU	1 Provinsi Riau	90 Ha	254.500.000	90 Ha		253.127.830	99,46
			2 JAMBI	2 Provinsi Jambi	90 Ha	274.500.000	90 Ha		273.918.400	99,79
			3 SUMATERA SELATAN	3 Provinsi Sumatera Selatan	90 Ha	269.500.000	90 Ha		269.411.950	99,97
			4 KALIMANTAN TENGAH	4 Provinsi Kalimantan Tengah	90 Ha	274.500.000	90 Ha		274.445.000	99,98
			5 KALIMANTAN SELATAN	5 Provinsi Kalimantan Selatan	60 Ha	192.809.000	60 Ha		168.019.668	87,14
			6 KALIMANTAN TIMUR	6 Provinsi Kalimantan Timur	60 Ha	215.600.000	60 Ha		215.358.450	99,89
		1 Sarana Penanggulangan Kebakaran Lahan Perkebunan			1 Ha	5.546.500.000	1 Ha		5.457.606.458	98,40
			1 DKI JAKARTA	1 DKI Jakarta	1 Ha	5.546.500.000	1 Ha		5.457.606.458	98,40
		3 Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan tanpa Membakar			100 Ha	2.278.450.000	100 Ha		2.250.245.070	98,76
		1 Demplot Pembukaan Lahan Perkebunan tanpa Membakar			100 Ha	2.278.450.000	100 Ha		2.250.245.070	98,76
			1 JAMBI	1 Provinsi Jambi	25 Ha	569.600.000	25 Ha		567.966.150	99,71
			2 SUMATERA SELATAN	2 Provinsi Sumatera Selatan	25 Ha	569.600.000	25 Ha		561.774.001	98,63
			3 KALIMANTAN TENGAH	3 Provinsi Kalimantan Tengah	25 Ha	569.650.000	25 Ha		562.808.000	98,80
			4 KALIMANTAN SELATAN	4 Provinsi Kalimantan Selatan	25 Ha	569.600.000	25 Ha		557.696.919	97,91

ITI	KODE	KEGIATAN		PROVINSI	KABUPATEN		TARGET		REALISASI					
							VOLUME		ANGGARAN	VOLUME		ANGGARAN		%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)		(6)		(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	1779.RAI.002	2	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan				11.631	Ha	49.354.744.000	11.631	Ha	49.284.166.204	99,86	
		5	Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar				5.156	Ha	25.878.783.000	5.156	Ha	25.841.010.485	99,85	
		1	Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Kakao				200	Ha	493.600.000	200	Ha	493.188.008	99,92	
				1	DI YOGYAKARTA	1	Kab. Kulon Progo	50	Ha	125.550.000	50	Ha	125.280.558	99,79
				3	SULAWESI SELATAN	3	Kab. Bone	50	Ha	134.550.000	50	Ha	134.407.450	99,89
				5	NUSA TENGGARA BARAT	5	Kab. Lombok Utara	50	Ha	130.050.000	50	Ha	130.050.000	100,00
				6	GORONTALO	6	Kab. Boalemo	50	Ha	103.450.000	50	Ha	103.450.000	100,00
		2	Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Kopi				150	Ha	117.200.000	150	Ha	116.957.650	99,79	
				1	BENGKULU	1	Kab. Kepahiang	50	Ha	105.700.000	50	Ha	105.477.650	99,79
				2	JAWA TENGAH	2	Kab. Temanggung	50	Ha	11.500.000	50	Ha	11.480.000	99,83
		3	Pengendalian OPT Tanaman Karet				75	Ha	137.937.000	75	Ha	130.117.000	94,33	
				1	JAMBI	1	Kab. Batanghari	50	Ha	84.787.000	50	Ha	84.487.000	99,65
				2	SUMATERA SELATAN	2	Kab. Musi Banyuasin	25	Ha	53.150.000	25	Ha	45.630.000	85,85
		4	Pengendalian OPT Tanaman Kelapa				100	Ha	225.687.000	100	Ha	224.887.000	99,65	
				1	JAWA BARAT	1	Kab. Pangandaran	50	Ha	123.462.000	50	Ha	122.662.000	99,35
				2	SULAWESI UTARA	2	Kab. Minahasa Selatan	50	Ha	102.225.000	50	Ha	102.225.000	100,00
		5	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati				4.631	Ha	24.904.359.000	4.631	Ha	24.875.860.827	99,89	
				1	DKI Jakarta	1	DKI Jakarta	4.631	Ha	24.904.359.000	4.631	Ha	24.875.860.827	99,89
		6	Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah				6.475	Ha	23.475.961.000	6.475	Ha	23.443.155.719	99,86	
		1	Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Lada				200	Ha	263.350.000	200	Ha	263.250.000	99,96	
				2	KEPULAUAN BANGKA BELITU	2	Kab. Bangka Selatan	100	Ha	263.350.000	100	Ha	263.250.000	99,96
		2	Penerapan Pengendalian Hama Terpadu OPT Cengkeh				150	Ha	281.550.000	150	Ha	273.754.000	97,23	
				1	JAWA TENGAH	1	Kab. Batang	50	Ha	73.150.000	50	Ha	72.950.000	99,73
				2	BALI	2	Kab. Buleleng	100	Ha	208.400.000	100	Ha	200.804.000	96,36
		3	Pengendalian OPT Tanaman Tebu				100	Ha	17.100.000	100	Ha	17.100.000	100,00	
				3	DI YOGYAKARTA	3	Kab. Sleman		Ha	17.100.000		Ha	17.100.000	100,00
		4	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati				6.025	Ha	22.913.961.000	6.025	Ha	22.889.051.719	99,89	
				1	DKI Jakarta	1	DKI Jakarta	6.025	Ha	22.913.961.000	6.025	Ha	22.889.051.719	99,89
		11	Pengawasan Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) Tanaman Tanhungan				1	Kegiatan	168.000.000	1	Kegiatan	166.955.794	99,38	
				1	DKI JAKARTA	1	DKI JAKARTA	1	Kegiatan	168.000.000	1	Kegiatan	166.955.794	99,38

Lampiran 8. Realisasi Keuangan Penguatan Perlindungan Perkebunan di Pusat tahun 2022

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2022

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2022

Kementerian: **018 KEMENTERIAN PERTANIAN**
 Unit Organisasi: **05 DITJEN PERKEBUNAN**
 Satuan Kerja : **238830 DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN**

Uraian	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi TA 2022	
		Rp.	%
JUMLAH SELURUHNYA	61.066.794.000	60.331.546.955	98,80 %
EC Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	61.066.794.000	60.331.546.955	98,80 %
EC.1779 Penguatan Perlindungan Perkebunan	61.066.794.000	60.331.546.955	98,80 %
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5.701.974.000	5.559.893.866	97,51 %
AFA.001 Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	5.701.974.000	5.559.893.866	97,51 %
051 Peraturan/Norma/Pedoman Perlindungan Perkebunan	5.701.974.000	5.559.893.866	97,51 %
051.0A PEMBUATAN BUKU SAKU	172.000.000	170.356.500	99,04 %
521211 Belanja Bahan	35.950.000	35.883.500	99,82 %
001421. Pencetakan buku	20.000.000	20.000.000	100,00 %
001422. Perlengkapan peserta tahap I	8.750.000	8.750.000	100,00 %
010059. Perlengkapan peserta tahap II	7.200.000	7.133.500	99,08 %
522151 Belanja Jasa Profesi	9.000.000	9.000.000	100,00 %
001424. Honor narasumber	9.000.000	9.000.000	100,00 %
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	127.050.000	125.473.000	98,76 %
001426. Pertemuan	48.750.000	48.750.000	100,00 %
001427. Perjalanan panitia, peserta, narasumber dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan pembahasan buku	78.300.000	76.723.000	97,99 %
051.0C PENGAWALAN PENGENDALIAN OPT TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH	208.000.000	207.746.647	99,88 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	208.000.000	207.746.647	99,88 %
001442. Penginapan	9.960.000	9.870.000	99,10 %
001443. Tiket	69.000.000	68.993.418	99,99 %
001444. Uang harian	26.400.000	26.400.000	100,00 %
001445. Transportasi	31.400.000	31.400.000	100,00 %
001446. Penginapan	33.200.000	33.047.388	99,54 %
001448. Tiket	20.700.000	20.699.464	100,00 %
001449. Uang harian	7.920.000	7.920.000	100,00 %
001450. Transportasi	9.420.000	9.416.377	99,96 %
051.0D PENGAWALAN PENGENDALIAN OPT TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR	88.980.000	88.802.600	99,80 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	88.980.000	88.802.600	99,80 %
001453. Tiket	37.950.000	37.935.300	99,96 %
001454. Uang harian	17.160.000	17.092.500	99,61 %
001455. Transportasi	17.270.000	17.223.382	99,73 %
001456. Penginapan	16.600.000	16.551.418	99,71 %
051.0E PEMBINAAN DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN PERANGKAT PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	179.200.000	177.589.856	99,10 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	179.200.000	177.589.856	99,10 %
001462. Penginapan	1.300.000	1.260.552	96,97 %
001463. Tiket	86.000.000	85.821.502	99,79 %
001464. Uang harian	26.400.000	26.387.000	99,95 %
001465. Transportasi	33.000.000	32.860.774	99,58 %
001466. Penginapan	25.000.000	23.898.028	95,59 %
001468. Tiket	3.300.000	3.295.000	99,85 %
001469. Uang harian	2.100.000	2.000.000	95,24 %
001470. Transportasi	2.100.000	2.067.000	98,43 %
051.0F PENGAWALAN PENANGANAN GANGGUAN USAHA PERKEBUNAN	72.500.000	68.930.238	95,08 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72.500.000	68.930.238	95,08 %
001472. Penginapan	2.800.000	2.706.432	96,66 %

Uraian		Pagu Revisi (Rp)	Realisasi TA 2022	
			Rp.	%
	001473. Tiket	30.000.000	28.363.471	94,54 %
	001474. Uang harian	12.800.000	12.160.000	95,00 %
	001475. Transportasi	10.000.000	9.580.860	95,81 %
	001476. Penginapan	11.200.000	10.439.475	93,21 %
	001479. Uang harian	3.200.000	3.180.000	99,38 %
	001480. Transportasi	2.500.000	2.500.000	100,00 %
051.0G	PENGAWALAN PENANGANAN KEBAKARAN LAHAN PERKEBUNAN	200.000.000	181.194.470	90,60 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	200.000.000	181.194.470	90,60 %
	001482. Penginapan	15.400.000	10.950.000	71,10 %
	001484. Tiket	3.750.000	2.630.900	70,16 %
	001485. Uang harian	1.600.000	1.140.000	71,25 %
	001486. Transportasi	1.250.000	648.970	51,92 %
	001487. Penginapan	1.400.000	675.000	48,21 %
	001488. Tiket	48.750.000	48.506.333	99,50 %
	001489. Uang harian	20.800.000	18.000.000	86,54 %
	001490. Transportasi	16.250.000	14.747.060	90,75 %
	001491. Penginapan	18.200.000	17.996.156	98,88 %
	001493. Tiket	41.250.000	40.665.974	98,58 %
	001494. Uang harian	17.600.000	16.099.777	91,48 %
	001495. Transportasi	13.750.000	9.134.300	66,43 %
051.0H	PENGAWALAN MITIGASI DAN ADAPTASI DAMPAK PERUBAHAN IKLIM	128.000.000	123.124.194	96,19 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	128.000.000	123.124.194	96,19 %
	001497. Penginapan	1.400.000	280.000	20,00 %
	001498. Tiket	56.250.000	55.907.494	99,39 %
	001499. Uang harian	24.000.000	23.830.000	99,29 %
	001500. Transportasi	18.750.000	17.272.000	92,12 %
	001501. Penginapan	21.000.000	19.334.700	92,07 %
	001503. Tiket	3.750.000	3.700.000	98,67 %
	001504. Uang harian	1.600.000	1.600.000	100,00 %
	001505. Transportasi	1.250.000	1.200.000	96,00 %
051.0I	PENGAWALAN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN SERTIFIKASI	271.500.000	270.437.563	99,61 %
051.0I	DESA PERTANIAN ORGANIK BERBASIS KOMODITAS PERKEBUNAN	271.500.000	270.437.563	99,61 %
521211	Belanja Bahan	15.000.000	15.000.000	100,00 %
	001506. Sampel produk organik perkebunan	15.000.000	15.000.000	100,00 %
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	67.200.000	67.200.000	100,00 %
	001508. Ketua	2.400.000	2.400.000	100,00 %
	001509. Wakil	1.800.000	1.800.000	100,00 %
	001510. Anggota	63.000.000	63.000.000	100,00 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	189.300.000	188.237.563	99,44 %
	001513. Tiket	98.900.000	98.181.964	99,27 %
	001514. Uang harian	25.200.000	25.200.000	100,00 %
	001515. Transportasi	36.000.000	35.831.940	99,53 %
	001516. Penginapan	24.000.000	23.873.659	99,47 %
	001518. Tiket	3.000.000	3.000.000	100,00 %
	001519. Uang harian	2.200.000	2.150.000	97,73 %
051.0K	PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN INTERN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	40.000.000	38.998.234	97,50 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.000.000	38.998.234	97,50 %
	001536. Tiket	17.250.000	16.999.670	98,55 %
	001537. Uang harian	6.600.000	6.345.825	96,15 %
	001538. Transportasi	7.850.000	7.675.000	97,77 %
	001539. Penginapan	8.300.000	7.977.739	96,12 %
051.0L	PEMBAHASAN dan KOORDINASI TERKAIT PROGRAM, ANGGARAN	133.800.000	132.912.744	99,34 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	133.800.000	132.912.744	99,34 %

Uraian		Pagu Revisi (Rp)	Realisasi TA 2022	
			Rp.	%
	001541. Tiket	65.550.000	65.043.500	99,23 %
	001542. Uang harian	19.800.000	19.704.728	99,52 %
	001543. Transportasi	23.550.000	23.400.000	99,36 %
	001544. Penginapan	24.900.000	24.764.516	99,46 %
051.0N	BIMTEK PETUGAS PENDAMPING DESA PERTANIAN ORGANIK BERBASIS KOMODITAS PERKEBUNAN	199.560.000	198.567.000	99,50 %
521211	Belanja Bahan	20.200.000	19.895.000	98,49 %
	001555. Perlengkapan Peserta (17 peserta daerah, 5 peserta pusat, 4 panitia pusat, 8 narasumber)	10.200.000	9.945.000	97,50 %
	001557. Perlengkapan Praktek	10.000.000	9.950.000	99,50 %
522151	Belanja Jasa Profesi	14.400.000	14.400.000	100,00 %
	001558. Honor narasumber	14.400.000	14.400.000	100,00 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.060.000	2.060.000	100,00 %
	001559. Dalam rangka persiapan dan penyelesaian administrasi pertemuan	2.060.000	2.060.000	100,00 %
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	162.900.000	162.212.000	99,58 %
	001560. Perjalanan Panitia Pusat	4.800.000	4.580.000	95,42 %
	001561. Perjalanan Peserta Pusat	6.000.000	6.000.000	100,00 %
	001562. Perjalanan Narasumber	9.300.000	9.140.000	98,28 %
	001563. Perjalanan Peserta Daerah 17 Provinsi)	76.500.000	76.192.000	99,60 %
	001564. Pelaksanaan Bimtek (17 peserta daerah, 5 peserta pusat, 4 panitia pusat, 8 narasumber)	66.300.000	66.300.000	100,00 %
051.0P	PENINGKATAN KAPABILITAS PENANGANAN OPT TANAMAN KAKAO	143.335.000	143.087.400	99,83 %
521211	Belanja Bahan	10.500.000	10.500.000	100,00 %
	001574. Perlengkapan kapabilitas	7.500.000	7.500.000	100,00 %
	001576. Bahan dan alat praktek	3.000.000	3.000.000	100,00 %
522151	Belanja Jasa Profesi	21.600.000	21.600.000	100,00 %
	001578. Honor narasumber	21.600.000	21.600.000	100,00 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.930.000	5.708.900	96,27 %
	001579. Perjalanan dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan	5.930.000	5.708.900	96,27 %
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	105.305.000	105.278.500	99,97 %
	001580. Pertemuan	52.500.000	52.500.000	100,00 %
	001581. Perjalanan dalam rangka menghadiri peningkatan kapabilitas	52.805.000	52.778.500	99,95 %
051.0Q	PENYEDIAAN BAHAN SOSIALISASI AUDIO DAN VISUAL PENGENDALIAN OPT TANAMAN PERKEBUNAN	100.000.000	99.973.272	99,97 %
522191	Belanja Jasa Lainnya	60.000.000	60.000.000	100,00 %
	001584. Pembuatan film	60.000.000	60.000.000	100,00 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.000.000	39.973.272	99,93 %
	001585. Perjalanan dalam rangka persiapan, pendampingan, monitoring pembuatan film	40.000.000	39.973.272	99,93 %
051.0R	PENINGKATAN KAPABILITAS PENANGANAN OPT TANAMAN TEBU	168.700.000	168.450.000	99,85 %
522191	Belanja Jasa Lainnya	110.000.000	110.000.000	100,00 %
	001593. Peningkatan kapabilitas Penanganan OPT Tanaman Tebu	110.000.000	110.000.000	100,00 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	58.700.000	58.450.000	99,57 %
	001594. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan	11.100.000	11.086.800	99,88 %
	006218. Dalam rangka mengikuti kegiatan peningkatan kapabilitas	47.600.000	47.363.200	99,50 %
051.0T	PENGAWALAN DAN PEMBINAAN KEDINASAN PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	2.017.249.000	1.996.496.596	98,97 %
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	88.652.000	87.843.671	99,09 %
	001606. Masker/Handsanitizer/Vitamin, dll	88.652.000	87.843.671	99,09 %
521211	Belanja Bahan	158.047.000	155.180.888	98,19 %
	001607. Administrasi, Fotocopy, dokumentasi, penggandaan laporan/pedumtek	68.647.000	68.541.888	99,85 %
	001608. Konsumsi Pertemuan/rapat-rapat	30.000.000	27.239.000	90,80 %
	010060. Perlengkapan kegiatan pembinaan SDM dan launching corporate identity Ditjen Perkebunan	59.400.000	59.400.000	100,00 %
522191	Belanja Jasa Lainnya	150.000.000	149.600.000	99,73 %
	006227. Pembinaan pegawai Dirat. Perlindungan Perkebunan	150.000.000	149.600.000	99,73 %
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	31.525.000	31.049.000	98,49 %
	001610. Test Covid 19	31.525.000	31.049.000	98,49 %

Uraian		Pagu Revisi (Rp)	Realisasi TA 2022	
			Rp.	%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.437.700.000	1.435.971.037	99,88 %
	001612. Penginapan	68.060.000	68.010.981	99,93 %
	001614. tiket perjalanan	348.450.000	348.444.769	100,00 %
	001615. uang harian	138.600.000	138.596.597	100,00 %
	001616. transport/taxi	164.850.000	164.846.813	100,00 %
	001617. Penginapan	174.300.000	174.290.706	99,99 %
	001622. tiket perjalanan	24.150.000	24.141.538	99,96 %
	001625. tiket perjalanan	41.400.000	41.395.700	99,99 %
	001626. uang harian	15.840.000	15.840.000	100,00 %
	001627. transport/taxi	18.840.000	18.822.578	99,91 %
	001628. Penginapan	19.920.000	19.830.600	99,55 %
	001629. uang harian	9.240.000	9.240.000	100,00 %
	001630. transport/taxi	10.990.000	10.789.000	98,17 %
	001631. Penginapan	11.620.000	11.436.120	98,42 %
	001633. tiket perjalanan	141.450.000	141.436.118	99,99 %
	001634. uang harian	54.120.000	54.081.837	99,93 %
	001635. transport/taxi	64.370.000	64.317.680	99,92 %
	006220. tiket perjalanan	10.350.000	10.350.000	100,00 %
	006221. uang harian	3.960.000	3.960.000	100,00 %
	006222. transport/taxi	4.710.000	4.710.000	100,00 %
	006223. Penginapan	4.980.000	4.980.000	100,00 %
	006225. uang harian	22.500.000	21.450.000	95,33 %
	006226. transport/taxi	85.000.000	85.000.000	100,00 %
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	151.325.000	136.852.000	90,44 %
	001639. Rapat/Pertemuan	63.200.000	49.932.000	79,01 %
	001640. Perjalanan menghadiri rapat/pertemuan	88.125.000	86.920.000	98,63 %
051.0U	PENGAWALAN PENERAPAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU	249.550.000	249.378.552	99,93 %
051.0U	(PHT) TANAMAN SEMUSIM DAN REMPAH	249.550.000	249.378.552	99,93 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	249.550.000	249.378.552	99,93 %
	001642. Penginapan	9.160.000	9.063.047	98,94 %
	001643. tiket	87.075.000	87.069.154	99,99 %
	001644. uang harian	35.504.000	35.495.000	99,97 %
	001645. Transportasi	34.076.000	34.064.716	99,97 %
	001646. Penginapan	64.120.000	64.080.676	99,94 %
	001648. tiket	9.675.000	9.669.959	99,95 %
	001649. uang harian	5.072.000	5.070.000	99,96 %
	001650. Transportasi	4.868.000	4.866.000	99,96 %
051.0W	PENERAPAN SNI ISO 9001:2015	50.000.000	49.750.000	99,50 %
522191	Belanja Jasa Lainnya	50.000.000	49.750.000	99,50 %
	001661. Pendampingan dan surveilans	50.000.000	49.750.000	99,50 %
051.0Y	SERTIFIKASI Climate Friendly Farming	61.600.000	49.230.000	79,92 %
521211	Belanja Bahan	4.100.000	1.500.000	36,59 %
	007879. Spanduk	1.100.000	0	0,00 %
	007880. Konsumsi Sosialisasi	1.500.000	1.500.000	100,00 %
	007881. Konsumsi peserta pelatihan	1.500.000	0	0,00 %
522191	Belanja Jasa Lainnya	36.250.000	36.050.000	99,45 %
	007882. Pelatihan dan Verifikasi CFF	36.250.000	36.050.000	99,45 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19.500.000	9.930.000	50,92 %
	007889. Pengawalan, Monev Sertifikasi CFF Petugas Pusat	16.000.000	7.380.000	46,13 %
	007890. Pengawalan, Monev Sertifikasi CFF Petugas Provinsi	3.500.000	2.550.000	72,86 %
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.750.000	1.750.000	100,00 %
	007887. Bantuan transport peserta pelatihan	1.750.000	1.750.000	100,00 %
051.0Z	Penyelenggaraan Hari Perkebunan	968.000.000	907.537.000	93,75 %

Uraian		Pagu Revisi (Rp)	Realisasi TA 2022	
			Rp.	%
521211	Belanja Bahan	160.250.000	160.122.000	99,92 %
	008567. Kaos olahraga	90.000.000	90.000.000	100,00 %
	009719. Konsumsi Pertemuan/rapat- rapat dalam rangka persiapan	30.000.000	29.972.000	99,91 %
	010309. Fotocopy, undangan, dll	24.250.000	24.150.000	99,59 %
	010312. ID Card dan Lanyard (Panitia dan Penjaga stand pameran)	16.000.000	16.000.000	100,00 %
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	26.150.000	26.150.000	100,00 %
	008574. Penanggung Jawab	450.000	450.000	100,00 %
	008575. Ketua	400.000	400.000	100,00 %
	008576. Sekretaris	300.000	300.000	100,00 %
	008577. Anggota	25.000.000	25.000.000	100,00 %
522191	Belanja Jasa Lainnya	538.000.000	538.000.000	100,00 %
	008580. Booth Tenant Standard	200.000.000	200.000.000	100,00 %
	008581. Venue Launching PAMIGO	200.000.000	200.000.000	100,00 %
	010383. Fasilitasi FGD	138.000.000	138.000.000	100,00 %
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	243.600.000	183.265.000	75,23 %
	010348. Dalam rangka Persiapan, Koordinasi , Menghadiri Acara, dll	243.600.000	183.265.000	75,23 %
051.AB	PERTEMUAN KOORDINASI PERLINDUNGAN PERKEBUNAN	250.000.000	237.331.000	94,93 %
521211	Belanja Bahan	33.000.000	32.600.000	98,79 %
	010319. Perlengkapan Peserta	32.000.000	31.800.000	99,38 %
	010320. Spanduk	1.000.000	800.000	80,00 %
522151	Belanja Jasa Profesi	16.000.000	15.200.000	95,00 %
	010321. Honor narasumber	16.000.000	15.200.000	95,00 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	10.000.000	9.525.000	95,25 %
	010322. Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan pertemuan	10.000.000	9.525.000	95,25 %
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	191.000.000	180.006.000	94,24 %
	010323. Pertemuan	120.000.000	120.000.000	100,00 %
	010324. Perjalanan panitia dalam rangka menghadiri pertemuan	11.750.000	11.750.000	100,00 %
	010325. Perjalanan narasumber dalam rangka menghadiri pertemuan	12.000.000	3.706.000	30,88 %
	010326. Perjalanan peserta pusat dalam rangka menghadiri pertemuan	47.250.000	44.550.000	94,29 %
RAI	Sarana Pengembangan Kawasan	55.364.820.000	54.771.653.089	98,93 %
RAI.001	Area Penanganan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun	7.546.500.000	7.006.740.543	92,85 %
051	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	2.000.000.000	1.549.134.085	77,46 %
051.OA	Survei dan pemetaan gambut pada lahan perkebunan kelapa sawit	717.800.000	598.755.548	83,42 %
521211	Belanja Bahan	200.230.000	168.592.200	84,20 %
	008494. Pencetakan draft dan peta final	15.500.000	15.000.000	96,77 %
	008495. Analisis contoh tanah	154.800.000	150.832.000	97,44 %
	008915. Fotocopy dan materai	4.000.000	600.000	15,00 %
	008916. Konsumsi rapat	20.000.000	0	0,00 %
	008917. ATK	5.930.000	2.160.200	36,43 %
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	20.570.000	14.240.000	69,23 %
	008498. Upah lapang	20.570.000	14.240.000	69,23 %
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	20.000.000	1.782.606	8,91 %
	008918. Pengiriman contoh tanah	20.000.000	1.782.606	8,91 %
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	60.000.000	59.866.000	99,78 %
	008496. Bahan lapang dan peta pendukung	30.000.000	30.000.000	100,00 %
	008497. Bahan gambar dan penunjang lainnya	30.000.000	29.866.000	99,55 %
522141	Belanja Sewa	60.000.000	54.000.000	90,00 %
	008499. Sewa kendaraan untuk groundcheck	60.000.000	54.000.000	90,00 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	301.000.000	262.224.742	87,12 %
	008500. Perjalanan dalam Rangka Survei dan Pemetaan	301.000.000	262.224.742	87,12 %
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	56.000.000	38.050.000	67,95 %
	008919. Perjalanan peserta dalam rangka pelaksanaan Konsinyasi	7.200.000	6.550.000	90,97 %

Uraian		Pagu Revisi (Rp)	Realisasi TA 2022	
			Rp.	%
	008920. Konsinyasi	41.600.000	24.300.000	58,41 %
	008921. Perjalanan Narasumber	7.200.000	7.200.000	100,00 %
051.0B	Bimbingan Teknis Pengelolaan Air di Perkebunan Kelapa Sawit Pada Lahan Gambut	322.700.000	206.643.020	64,04 %
521211	Belanja Bahan	23.900.000	23.800.000	99,58 %
	008501. Perlengkapan untuk peserta Bimtek	22.800.000	22.800.000	100,00 %
	008502. Spanduk	1.100.000	1.000.000	90,91 %
522141	Belanja Sewa	3.000.000	0	0,00 %
	008504. Sewa kendaraan untuk groundcheck	3.000.000	0	0,00 %
522151	Belanja Jasa Profesi	14.400.000	9.000.000	62,50 %
	008503. Honor narasumber	14.400.000	9.000.000	62,50 %
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	281.400.000	173.843.020	61,78 %
	008505. Perjalanan panitia pusat dalam rangka pelaksanaan Bimtek	24.000.000	14.547.920	60,62 %
	008506. Perjalanan peserta pusat dalam rangka pelaksanaan Bimtek	96.000.000	25.017.860	26,06 %
	008507. Perjalanan peserta provinsi dalam rangka pelaksanaan Bimtek	8.400.000	5.400.000	64,29 %
	008508. Perjalanan peserta kabupaten dan petani dalam rangka pelaksanaan	45.000.000	41.614.000	92,48 %
	008509. Pertemuan Bimtek	76.000.000	76.000.000	100,00 %
	008510. Perjalanan Narasumber	32.000.000	11.263.240	35,20 %
051.0C	Fokus Grup Diskusi (FGD) Penurunan Emisi GRK Pada Perkebunan Kelapa Sawit	658.700.000	517.591.641	78,58 %
521211	Belanja Bahan	92.400.000	46.000.000	49,78 %
	008511. Perlengkapan untuk peserta FGD (2 kali) 90 orang	90.000.000	45.000.000	50,00 %
	008512. Spanduk	2.400.000	1.000.000	41,67 %
522151	Belanja Jasa Profesi	32.600.000	19.420.000	59,57 %
	008513. Honor narasumber	27.000.000	18.720.000	69,33 %
	010384. Honor Moderator	5.600.000	700.000	12,50 %
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	533.700.000	452.171.641	84,72 %
	008514. Perjalanan peserta pusat dalam rangka pelaksanaan FGD di Jawa Barat	60.900.000	56.226.494	92,33 %
	008515. Perjalanan peserta pusat dalam rangka pelaksanaan FGD di Jambi	20.000.000	18.895.340	94,48 %
	008516. Perjalanan peserta Provinsi dan kabupaten dalam rangka Ke Pusat pelaksanaan FGD	80.000.000	50.306.187	62,88 %
	008517. Perjalanan peserta Provinsi dan kabupaten dalam rangka pelaksanaan FGD	26.400.000	24.830.000	94,05 %
	008922. Pertemuan FGD	270.000.000	252.000.000	93,33 %
	008923. Perjalanan Narasumber ke Jawa Barat/Banten	8.400.000	6.201.062	73,82 %
	008924. Perjalanan Narasumber ke Jambi	16.000.000	12.841.144	80,26 %
	008934. Perjalanan Panitia dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan	52.000.000	30.871.414	59,37 %
051.0D	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi dalam Rangka Pengawasan Program BioCF ISFL Prov. Jambi	300.800.000	226.143.876	75,18 %
521211	Belanja Bahan	30.110.000	9.794.300	32,53 %
	008518. Adm. fotocopy, laporan dll	4.800.000	4.644.300	96,76 %
	008520. ATK dan bahan komputer	5.310.000	5.150.000	96,99 %
	008531. Konsumsi rapat	20.000.000	0	0,00 %
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	19.800.000	19.800.000	100,00 %
	008521. Pembina	1.000.000	1.000.000	100,00 %
	008522. Ketua	800.000	800.000	100,00 %
	008523. Anggota	18.000.000	18.000.000	100,00 %
522191	Belanja Jasa Lainnya	9.000.000	7.603.500	84,48 %
	008936. Pembuatan film dokumentasi kegiatan	9.000.000	7.603.500	84,48 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	241.890.000	188.946.076	78,11 %
	008524. Perjalanan dalam rangka koordinasi, konsultasi, monev, pengolahan data, dan penyusunan laporan	225.000.000	173.346.076	77,04 %
	008935. Perjalanan dalam rangka rapat luar kota	16.890.000	15.600.000	92,36 %
052	Operasional Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun	5.546.500.000	5.457.606.458	98,40 %
052.0A	Sarana Penanggulangan Kebakaran Lahan Perkebunan di Prov. Kalimantan Tengah (6 Brigade)	986.300.000	975.021.051	98,86 %
522141	Belanja Sewa	10.000.000	7.500.000	75,00 %
	001732. Sewa kendaraan untuk distribusi barang	10.000.000	7.500.000	75,00 %

Uraian		Pagu Revisi (Rp)	Realisasi TA 2022	
			Rp.	%
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.500.000	57.877.551	88,36 %
	001734. Perjalanan Petugas Provinsi dalam rangka pengawalan dan monev	17.500.000	17.180.000	98,17 %
	001736. Perjalanan Petugas Pusat dalam rangka pengawalan dan monev	48.000.000	40.697.551	84,79 %
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	910.800.000	909.643.500	99,87 %
	001739. Pompa Pemadam Kebakaran Lahan Perkebunan	854.100.000	853.200.000	99,89 %
	008694. Handy Talky	56.700.000	56.443.500	99,55 %
052.0B	Sarana Penanggulangan Kebakaran Lahan Perkebunan di Prov. Jambi (6 Brigade)	975.675.000	963.643.700	98,77 %
522141	Belanja Sewa	12.525.000	10.000.000	79,84 %
	007898. Sewa kendaraan untuk distribusi barang	12.525.000	10.000.000	79,84 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.000.000	51.501.700	85,84 %
	007900. Perjalanan Petugas Provinsi dalam rangka pengawalan dan monev	20.000.000	18.921.000	94,61 %
	007901. Perjalanan Petugas Pusat dalam rangka pengawalan dan monev	40.000.000	32.580.700	81,45 %
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	903.150.000	902.142.000	99,89 %
	007902. Pompa Pemadam Kebakaran Lahan Perkebunan	846.900.000	846.000.000	99,89 %
	008695. Handy Talky	56.250.000	56.142.000	99,81 %
052.0C	Sarana Penanggulangan Kebakaran Lahan Perkebunan di Prov. Sumatera Selatan (6 Brigade)	981.150.000	970.313.700	98,90 %
522141	Belanja Sewa	12.500.000	9.100.000	72,80 %
	007911. Sewa kendaraan untuk distribusi barang	12.500.000	9.100.000	72,80 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.500.000	62.671.700	95,68 %
	007913. Perjalanan Petugas Provinsi dalam rangka pengawalan dan monev	17.500.000	16.381.600	93,61 %
	007914. Perjalanan Petugas Pusat dalam rangka pengawalan dan monev	48.000.000	46.290.100	96,44 %
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	903.150.000	898.542.000	99,49 %
	007915. Pompa Pemadam Kebakaran Lahan Perkebunan	846.900.000	842.400.000	99,47 %
	008696. Handy Talky	56.250.000	56.142.000	99,81 %
052.0D	Sarana Penanggulangan Kebakaran Lahan Perkebunan di Prov. Riau (6 Brigade)	972.150.000	961.750.900	98,93 %
522141	Belanja Sewa	11.500.000	10.500.000	91,30 %
	007924. Sewa kendaraan untuk distribusi barang	11.500.000	10.500.000	91,30 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.500.000	49.108.900	85,41 %
	007926. Perjalanan Petugas Provinsi dalam rangka pengawalan dan monev	17.500.000	17.310.000	98,91 %
	007927. Perjalanan Petugas Pusat dalam rangka pengawalan dan monev	40.000.000	31.798.900	79,50 %
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	903.150.000	902.142.000	99,89 %
	007928. Pompa Pemadam Kebakaran Lahan Perkebunan	846.900.000	846.000.000	99,89 %
	008697. Handy Talky	56.250.000	56.142.000	99,81 %
052.0E	Sarana Penanggulangan Kebakaran Lahan Perkebunan di Prov. Kalimantan Timur (4 Brigade)	681.700.000	672.398.790	98,64 %
522141	Belanja Sewa	9.000.000	6.500.000	72,22 %
	007937. Sewa kendaraan untuk distribusi barang	9.000.000	6.500.000	72,22 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.500.000	59.403.790	90,69 %
	007939. Perjalanan Petugas Provinsi dalam rangka pengawalan dan monev	17.500.000	17.330.000	99,03 %
	007940. Perjalanan Petugas Pusat dalam rangka pengawalan dan monev	48.000.000	42.073.790	87,65 %
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	607.200.000	606.495.000	99,88 %
	007941. Pompa Pemadam Kebakaran Lahan Perkebunan	569.400.000	568.800.000	99,89 %
	008698. Handy Talky	37.800.000	37.695.000	99,72 %
052.0F	Sarana Penanggulangan Kebakaran Lahan Perkebunan di Prov. Kalimantan Selatan (4 Brigade)	680.200.000	669.304.497	98,40 %
522141	Belanja Sewa	7.500.000	5.000.000	66,67 %
	007950. Sewa kendaraan untuk distribusi barang	7.500.000	5.000.000	66,67 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	65.500.000	59.075.497	90,19 %
	007952. Perjalanan Petugas Provinsi dalam rangka pengawalan dan monev	17.500.000	17.306.000	98,89 %
	007953. Perjalanan Petugas Pusat dalam rangka pengawalan dan monev	48.000.000	41.769.497	87,02 %

Uraian		Pagu Revisi (Rp)	Realisasi TA 2022	
			Rp.	%
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	607.200.000	605.229.000	99,68 %
	007954. Pompa Pemadam Kebakaran Lahan Perkebunan	569.400.000	567.600.000	99,68 %
	008699. Handy Talky	37.800.000	37.629.000	99,55 %
052.0G	Sarana Penanggulangan Kebakaran Lahan Perkebunan di Prov. Nusa Tenggara Barat (1 KTPA) 6 unit	194.825.000	170.673.820	87,60 %
522141	Belanja Sewa	6.000.000	0	0,00 %
	007964. Sewa kendaraan untuk distribusi barang	6.000.000	0	0,00 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71.000.000	53.173.820	74,89 %
	007973. Perjalanan Petugas Provinsi dalam rangka pengawalan dan Monev	20.000.000	19.037.520	95,19 %
	007974. Perjalanan Petugas Pusat dalam rangka pengawalan dan Monev	48.000.000	31.166.300	64,93 %
	008930. Perjalanan petugas kabupaten dalam rangka pengawalan dan Monev	3.000.000	2.970.000	99,00 %
526112	Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	117.825.000	117.500.000	99,72 %
	008794. Pompa Pemadam Kebakaran Lahan Perkebunan	117.825.000	117.500.000	99,72 %
052.0H	Fasilitasi Dukungan Penyelenggaraan Hari Perkebunan	74.500.000	74.500.000	100,00 %
521211	Belanja Bahan	74.500.000	74.500.000	100,00 %
	009468. Filler acara Hari Perkebunan	74.500.000	74.500.000	100,00 %
RAI.002	Area Penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Perkebunan (PEN)	47.818.320.000	47.764.912.546	99,89 %
051	Pengendalian OPT Tanaman Tahunan dan Penyegar	22.606.176.000	22.591.719.000	99,94 %
051.0A	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi LAMPUNG 400 Ha	1.668.642.000	1.668.520.000	99,99 %
522141	Belanja Sewa	18.000.000	18.000.000	100,00 %
	007029. Sewa Kendaraan untuk Distribusi pestisida nabati	18.000.000	18.000.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.650.642.000	1.650.520.000	99,99 %
	001664. Kakao Hama PBK (Conopomorpha cramerella)	538.440.000	538.400.000	99,99 %
	001665. Kopi Hama PBKo (Hypotenemus hampei)	538.440.000	538.400.000	99,99 %
	007027. Kakao (VSD)	327.864.000	327.840.000	99,99 %
	007028. Kopi Penyakit Karat Daun (Hemileia vastatrix)	245.898.000	245.880.000	99,99 %
051.0B	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi SUMATERA SELATAN 200 Ha	802.067.000	801.980.000	99,99 %
522141	Belanja Sewa	9.000.000	9.000.000	100,00 %
	007111. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	9.000.000	9.000.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	793.067.000	792.980.000	99,99 %
	001667. Kopi Penyakit Karat Daun (Hemileia vastatrix)	248.607.000	248.580.000	99,99 %
	001669. Kopi Hama PBKo (Hypotenemus hampei)	544.460.000	544.400.000	99,99 %
051.0C	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi BENGKULU 300 Ha	1.356.270.000	1.353.475.000	99,79 %
522141	Belanja Sewa	13.500.000	10.950.000	81,11 %
	007112. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	13.500.000	10.950.000	81,11 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.342.770.000	1.342.525.000	99,98 %
	001671. Kopi Penyakit Karat Daun (Hemileia vastatrix)	249.570.000	249.525.000	99,98 %
	001673. Kopi Hama PBKo (Hypotenemus hampei)	1.093.200.000	1.093.000.000	99,98 %
051.0D	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi BANTEN 100 Ha	549.010.000	548.750.000	99,95 %
522141	Belanja Sewa	6.750.000	6.750.000	100,00 %
	007113. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	6.750.000	6.750.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	542.260.000	542.000.000	99,95 %
	001677. Kakao Hama PBK (Conopomorpha cramerella)	542.260.000	542.000.000	99,95 %
051.0E	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi BALI 300 Ha	1.380.329.000	1.376.180.000	99,70 %
522141	Belanja Sewa	13.500.000	9.400.000	69,63 %
	007133. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	13.500.000	9.400.000	69,63 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.366.829.000	1.366.780.000	100,00 %
	001680. Kopi Penyakit Karat Daun (Hemileia vastatrix)	253.989.000	253.980.000	100,00 %
	001682. Kopi Hama PBKo (Hypotenemus hampei)	556.420.000	556.400.000	100,00 %
	001683. PBK (Conopomorpha cramerella)	556.420.000	556.400.000	100,00 %
051.0F	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi SULAWESI SELATAN 350 Ha	1.593.247.000	1.591.800.000	99,91 %

Uraian		Pagu Revisi (Rp)	Realisasi TA 2022	
			Rp.	%
522141	Belanja Sewa	15.750.000	14.500.000	92,06 %
	007156. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	15.750.000	14.500.000	92,06 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.577.497.000	1.577.300.000	99,99 %
	001685. Kakao (VSD)	338.442.000	338.400.000	99,99 %
	001686. Kopi Penyakit Karat Daun (Hemileia vastatrix)	126.915.000	126.900.000	99,99 %
	001688. Kakao Hama PBK (Conopomorpha cramerella)	556.070.000	556.000.000	99,99 %
	001689. Kopi Hama PBKo (Hypotenemus hampei)	556.070.000	556.000.000	99,99 %
051.0G	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi SULAWESI TENGGARA 441 Ha	2.369.220.000	2.369.140.000	100,00 %
522141	Belanja Sewa	22.500.000	22.500.000	100,00 %
	007173. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	22.500.000	22.500.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2.346.720.000	2.346.640.000	100,00 %
	001691. Kakao (VSD)	355.212.000	355.200.000	100,00 %
	001693. Kakao Hama PBK (Conopomorpha cramerella)	1.407.488.000	1.407.440.000	100,00 %
	007172. Kopi Hama PBKo (Hypotenemus hampei)	584.020.000	584.000.000	100,00 %
051.0H	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi SULAWESI UTARA 350 Ha	2.067.134.000	2.067.050.000	100,00 %
522141	Belanja Sewa	20.250.000	20.250.000	100,00 %
	007231. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	20.250.000	20.250.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2.046.884.000	2.046.800.000	100,00 %
	001697. Kakao Hama PBK (Conopomorpha cramerella)	877.236.000	877.200.000	100,00 %
	001698. Kopi Hama PBKo (Hypotenemus hampei)	1.169.648.000	1.169.600.000	100,00 %
051.0I	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi D.I. YOGYAKARTA 125 Ha	580.308.000	579.285.000	99,82 %
522141	Belanja Sewa	6.750.000	6.000.000	88,89 %
	007234. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	6.750.000	6.000.000	88,89 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	573.558.000	573.285.000	99,95 %
	001700. Kakao Hama PBK (Conopomorpha cramerella)	407.970.000	407.775.000	99,95 %
	007233. Kakao (VSD)	165.588.000	165.510.000	99,95 %
051.0J	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi JAWA TENGAH 300 Ha	1.343.579.000	1.341.280.000	99,83 %
522141	Belanja Sewa	13.500.000	11.250.000	83,33 %
	007235. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	13.500.000	11.250.000	83,33 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.330.079.000	1.330.030.000	100,00 %
	001702. Kopi Penyakit Karat Daun (Hemileia vastatrix)	247.239.000	247.230.000	100,00 %
	001704. Kakao Hama PBK (Conopomorpha cramerella)	541.420.000	541.400.000	100,00 %
	001705. Kopi Hama PBKo (Hypotenemus hampei)	541.420.000	541.400.000	100,00 %
051.0K	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi Sulawesi Tengah 350 Ha	1.823.342.000	1.823.280.000	100,00 %
522141	Belanja Sewa	18.000.000	18.000.000	100,00 %
	007250. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	18.000.000	18.000.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.805.342.000	1.805.280.000	100,00 %
	007252. Kakao (VSD)	353.292.000	353.280.000	100,00 %
	007254. Kakao Hama PBK (Conopomorpha cramerella)	871.230.000	871.200.000	100,00 %
	007255. Kopi Hama PBKo (Hypotenemus hampei)	580.820.000	580.800.000	100,00 %
051.0L	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi Gorontalo 200 Ha	927.982.000	927.976.000	100,00 %
522141	Belanja Sewa	9.000.000	9.000.000	100,00 %
	007256. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	9.000.000	9.000.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	918.982.000	918.976.000	100,00 %
	007258. Kakao (VSD)	347.618.000	347.616.000	100,00 %
	007260. Kakao Hama PBK (Conopomorpha cramerella)	571.364.000	571.360.000	100,00 %
051.0M	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi JAMBI 200 Ha	805.193.000	804.590.000	99,93 %
522141	Belanja Sewa	9.000.000	9.000.000	100,00 %
	007269. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	9.000.000	9.000.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	796.193.000	795.590.000	99,92 %
	007271. Kopi Penyakit Karat Daun (Hemileia vastatrix)	249.577.000	249.390.000	99,93 %

Uraian		Pagu Revisi (Rp)	Realisasi TA 2022	
			Rp.	%
	007273. Kopi Hama PBKo (Hypotenemus hampei)	546.616.000	546.200.000	99,92 %
051.0N	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi NTB 250 Ha	1.257.784.000	1.257.740.000	100,00 %
522141	Belanja Sewa	13.500.000	13.500.000	100,00 %
	007286. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	13.500.000	13.500.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.244.284.000	1.244.240.000	100,00 %
	007288. Kopi Penyakit Karat Daun (Hemileia vastatrix)	127.444.000	127.440.000	100,00 %
	007290. Kakao Hama PBK (Conopomorpha cramerella)	558.420.000	558.400.000	100,00 %
	007291. Kopi Hama PBKo (Hypotenemus hampei)	558.420.000	558.400.000	100,00 %
051.0O	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi Aceh 75 Ha	422.733.000	422.733.000	100,00 %
522141	Belanja Sewa	4.500.000	4.500.000	100,00 %
	007308. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	4.500.000	4.500.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	418.233.000	418.233.000	100,00 %
	007310. Kakao Hama PBK (Conopomorpha cramerella)	418.233.000	418.233.000	100,00 %
051.0P	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi Sumatera Barat 150 Ha	730.281.000	730.040.000	99,97 %
522141	Belanja Sewa	9.000.000	9.000.000	100,00 %
	007311. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	9.000.000	9.000.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	721.281.000	721.040.000	99,97 %
	007313. Kakao (VSD)	168.295.000	168.240.000	99,97 %
	007315. Kakao Hama PBK (Conopomorpha cramerella)	552.986.000	552.800.000	99,97 %
051.0Q	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi Sulawesi Barat 150 Ha	745.952.000	745.100.000	99,89 %
522141	Belanja Sewa	9.000.000	8.850.000	98,33 %
	007316. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	9.000.000	8.850.000	98,33 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	736.952.000	736.250.000	99,90 %
	007318. Kakao (VSD)	171.912.000	171.750.000	99,91 %
	007320. Kakao Hama PBK (Conopomorpha cramerella)	565.040.000	564.500.000	99,90 %
051.0R	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi Papua 190 Ha	946.050.000	946.050.000	100,00 %
522141	Belanja Sewa	11.250.000	11.250.000	100,00 %
	007332. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	11.250.000	11.250.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	934.800.000	934.800.000	100,00 %
	007334. Kakao (VSD)	376.800.000	376.800.000	100,00 %
	007336. Kakao Hama PBK (Conopomorpha cramerella)	558.000.000	558.000.000	100,00 %
051.0S	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi Papua Barat 150 Ha	948.210.000	948.000.000	99,98 %
522141	Belanja Sewa	9.000.000	9.000.000	100,00 %
	007337. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	9.000.000	9.000.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	939.210.000	939.000.000	99,98 %
	007341. Kakao Hama PBK (Conopomorpha cramerella)	939.210.000	939.000.000	99,98 %
051.0T	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di Provinsi Kalimantan Utara 50 Ha	288.843.000	288.750.000	99,97 %
522141	Belanja Sewa	4.500.000	4.500.000	100,00 %
	007373. Sewa Kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	4.500.000	4.500.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	284.343.000	284.250.000	99,97 %
	007375. Kakao Hama PBK (Conopomorpha cramerella)	284.343.000	284.250.000	99,97 %
052	Pengendalian OPT Tanaman Semusim dan Rempah	21.606.262.000	21.586.712.000	99,91 %
052.0A	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di PROVINSI LAMPUNG 425 Ha	1.057.081.000	1.056.240.000	99,92 %
522141	Belanja Sewa	11.250.000	11.250.000	100,00 %
	007662. Sewa kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	11.250.000	11.250.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.045.831.000	1.044.990.000	99,92 %
	001707. Busuk Pangkal Batang Lada (Phytophthora capsici)	1.045.831.000	1.044.990.000	99,92 %
052.0B	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di PROVINSI SUMATERA SELATAN 250 Ha	628.830.000	628.200.000	99,90 %
522141	Belanja Sewa	6.750.000	6.750.000	100,00 %
	007663. Sewa kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	6.750.000	6.750.000	100,00 %

Uraian		Pagu Revisi (Rp)	Realisasi TA 2022	
			Rp.	%
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	622.080.000	621.450.000	99,90 %
	001709. Busuk Pangkal Batang Lada (Phytophthora capsici)	622.080.000	621.450.000	99,90 %
052.0C	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di PROVINSI KEP. BANGKA BELITUNG 600 Ha	1.521.251.000	1.518.075.000	99,79 %
522141	Belanja Sewa	18.971.000	16.065.000	84,68 %
	007664. Sewa kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	18.971.000	16.065.000	84,68 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.502.280.000	1.502.010.000	99,98 %
	001711. Busuk Pangkal Batang Lada (Phytophthora capsici)	1.502.280.000	1.502.010.000	99,98 %
052.0D	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di PROVINSI BANTEN 25 Ha	64.154.000	64.125.000	99,95 %
522141	Belanja Sewa	2.250.000	2.250.000	100,00 %
	007665. Sewa kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	2.250.000	2.250.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	61.904.000	61.875.000	99,95 %
	001713. Busuk Pangkal Batang Lada (Phytophthora capsici)	61.904.000	61.875.000	99,95 %
052.0E	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di PROVINSI KALIMANTAN UTARA 200 Ha	525.767.000	525.600.000	99,97 %
522141	Belanja Sewa	6.750.000	6.750.000	100,00 %
	007666. Sewa kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	6.750.000	6.750.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	519.017.000	518.850.000	99,97 %
	001715. Busuk Pangkal Batang Lada (Phytophthora capsici)	519.017.000	518.850.000	99,97 %
052.0F	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 300 Ha	772.619.000	772.425.000	99,97 %
522141	Belanja Sewa	9.000.000	9.000.000	100,00 %
	007669. Sewa kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	9.000.000	9.000.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	763.619.000	763.425.000	99,97 %
	007668. Busuk Pangkal Batang Lada (Phytophthora capsici)	763.619.000	763.425.000	99,97 %
052.0G	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di PROVINSI KALIMANTAN BARAT 200 Ha	516.294.000	515.610.000	99,87 %
522141	Belanja Sewa	6.750.000	6.750.000	100,00 %
	007672. Sewa kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	6.750.000	6.750.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	509.544.000	508.860.000	99,87 %
	007671. Busuk Pangkal Batang Lada (Phytophthora capsici)	509.544.000	508.860.000	99,87 %
052.0I	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di PROVINSI SULAWESI SELATAN 875 Ha	2.372.691.000	2.372.150.000	99,98 %
522141	Belanja Sewa	24.750.000	24.500.000	98,99 %
	007678. Sewa kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	24.750.000	24.500.000	98,99 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2.347.941.000	2.347.650.000	99,99 %
	007677. Busuk Pangkal Batang Lada (Phytophthora capsici)	2.030.652.000	2.030.400.000	99,99 %
	008322. JAP Cengkeh (Rigidophorus microporus)	317.289.000	317.250.000	99,99 %
052.0J	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di PROVINSI SULAWESI TENGGARA 600 Ha	1.614.204.000	1.614.150.000	100,00 %
522141	Belanja Sewa	15.750.000	15.750.000	100,00 %
	007681. Sewa kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	15.750.000	15.750.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	1.598.454.000	1.598.400.000	100,00 %
	007680. Busuk Pangkal Batang Lada (Phytophthora capsici)	1.598.454.000	1.598.400.000	100,00 %
052.0K	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di PROVINSI SULAWESI BARAT 100 Ha	262.368.000	262.025.000	99,87 %
522141	Belanja Sewa	4.500.000	4.400.000	97,78 %
	007684. Sewa kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	4.500.000	4.400.000	97,78 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	257.868.000	257.625.000	99,91 %
	007683. Busuk Pangkal Batang Lada (Phytophthora capsici)	257.868.000	257.625.000	99,91 %
052.0L	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di PROVINSI BALI 600 Ha	2.566.890.000	2.556.300.000	99,59 %
522141	Belanja Sewa	27.000.000	16.500.000	61,11 %
	007685. Sewa kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	27.000.000	16.500.000	61,11 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	2.539.890.000	2.539.800.000	100,00 %
	007687. JAP Cengkeh (Rigidophorus microporus)	2.539.890.000	2.539.800.000	100,00 %
052.0M	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di PROVINSI JAWA TENGAH 795 Ha	4.120.667.000	4.120.517.500	100,00 %
522141	Belanja Sewa	42.750.000	42.750.000	100,00 %

Uraian		Pagu Revisi (Rp)	Realisasi TA 2022	
			Rp.	%
	007688. Sewa kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	42.750.000	42.750.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	4.077.917.000	4.077.767.500	100,00 %
	007690. JAP Cengkeh (Rigidophorus microporus)	721.113.000	721.087.500	100,00 %
	007692. Penggerek pucuk tebu (Scripophaga nivella)	3.356.804.000	3.356.680.000	100,00 %
052.0N	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di PROVINSI JAWA TIMUR 830 Ha	4.465.781.000	4.465.619.500	100,00 %
522141	Belanja Sewa	45.000.000	44.999.500	100,00 %
	007693. Sewa kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	45.000.000	44.999.500	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	4.420.781.000	4.420.620.000	100,00 %
	007695. JAP Cengkeh (Rigidophorus microporus)	417.315.000	417.300.000	100,00 %
	007697. Penggerek pucuk tebu (Scripophaga nivella)	4.003.466.000	4.003.320.000	100,00 %
052.0O	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di PROVINSI NTB 100 Ha	430.215.000	429.300.000	99,79 %
522141	Belanja Sewa	4.500.000	4.500.000	100,00 %
	007698. Sewa kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	4.500.000	4.500.000	100,00 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	425.715.000	424.800.000	99,79 %
	007700. JAP Cengkeh (Rigidophorus microporus)	425.715.000	424.800.000	99,79 %
052.0P	Pengendalian OPT Tanaman Perkebunan dengan Pestisida Nabati di PROVINSI D.I YOGJAKARTA 125 Ha	687.450.000	686.375.000	99,84 %
522141	Belanja Sewa	9.000.000	8.000.000	88,89 %
	007701. Sewa kendaraan untuk distribusi pestisida nabati	9.000.000	8.000.000	88,89 %
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	678.450.000	678.375.000	99,99 %
	007703. Penggerek pucuk tebu (Scripophaga nivella)	678.450.000	678.375.000	99,99 %
053	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan	3.605.882.000	3.586.481.546	99,46 %
053.0A	Pengawasan dan Pendampingan Kegiatan Pengendalian OPT Tanaman Tanhungan dengan Pestisida Nabati	2.130.184.000	2.117.186.033	99,39 %
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	120.000.000	119.006.000	99,17 %
	008926. Masker/Handsanitizer/Vitamin, dll	120.000.000	119.006.000	99,17 %
522191	Belanja Jasa Lainnya	302.500.000	301.589.600	99,70 %
	010062. Kajian Evaluasi Kegiatan Bantuan Pestisida Nabati di Lingkup Direktorat Perlindungan Perkebunan	100.000.000	99.320.025	99,32 %
	010063. Kajian Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Desa Pertanian Organik Berbasis Komoditas Perkebunan	100.000.000	99.769.575	99,77 %
	010440. Fasilitasi FGD	102.500.000	102.500.000	100,00 %
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	5.684.000	3.042.224	53,52 %
	001728. Dalam Rangka test covid 19	5.684.000	3.042.224	53,52 %
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.702.000.000	1.693.548.209	99,50 %
	001729. Dalam Rangka Pengambilan Sampel untuk uji mutu Pusat ke Propinsi di 20 provinsi	80.000.000	79.998.395	100,00 %
	001730. Dalam Rangka Pengawasan, pendampingan dan monev Pusat ke Propinsi di 20 provinsi	1.024.000.000	1.021.846.180	99,79 %
	007705. Propinsi Lampung	30.000.000	29.883.000	99,61 %
	007706. Propinsi Sumatera Selatan	22.000.000	21.990.772	99,96 %
	007707. Propinsi Bengkulu	26.000.000	25.872.000	99,51 %
	007708. Propinsi Banten	22.000.000	21.545.600	97,93 %
	007709. Propinsi Bali	26.000.000	25.985.000	99,94 %
	007710. Propinsi Sulawesi Selatan	32.000.000	30.759.200	96,12 %
	007711. Propinsi Sulawesi Tenggara	32.000.000	31.846.100	99,52 %
	007712. Propinsi Sulawesi Utara	32.000.000	31.301.600	97,82 %
	007713. Propinsi D.I Yogyakarta	22.000.000	22.000.000	100,00 %
	007714. Propinsi Jawa Tengah	26.000.000	25.922.400	99,70 %
	007715. Propinsi Sulawesi Tengah	32.000.000	31.988.600	99,96 %
	007716. Propinsi Gorontalo	22.000.000	21.988.000	99,95 %
	007717. Propinsi Jambi	22.000.000	21.995.000	99,98 %
	007718. Propinsi Nusa Tenggara Barat	26.000.000	26.000.000	100,00 %
	007719. Propinsi Aceh	22.000.000	21.509.000	97,77 %
	007720. Propinsi Sumatera Barat	22.000.000	21.950.000	99,77 %
	007721. Propinsi Sulawesi Barat	22.000.000	21.848.700	99,31 %
	007722. Propinsi Papua	26.000.000	25.980.000	99,92 %

Uraian	Pagu Revisi (Rp)	Realisasi TA 2022	
		Rp.	%
007723. Propinsi Papua Barat	22.000.000	21.988.700	99,95 %
007724. Propinsi Kalimantan Utara	22.000.000	21.982.600	99,92 %
009873. Perjalanan Petani dan Pendamping dalam rangka Bimtek	50.000.000	47.836.132	95,67 %
010385. Perjalanan Koordinasi dengan instansi terkait (koordinasi, seminar, pertemuan, lokakarya, rapat, dan penugasan lainnya)	40.000.000	39.531.230	98,83 %
053.0B Pengawasan dan pendampingan Kegiatan Pengendalian OPT Tanaman Tansimpah dengan Pestisida Nabati	1.307.698.000	1.302.339.719	99,59 %
522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	1.998.000	759.000	37,99 %
007725. Dalam Rangka test covid 19	1.998.000	759.000	37,99 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.305.700.000	1.301.580.719	99,68 %
007726. Dalam Rangka Pengambilan Sampel untuk uji mutu Pusat ke Provinsi di 15 provinsi	65.700.000	64.921.864	98,82 %
007727. Dalam Rangka Pengawasan, pendampingan dan Monev Pusat ke Provinsi di 15 provinsi	856.000.000	855.655.455	99,96 %
007729. Propinsi Lampung	10.000.000	9.925.000	99,25 %
007730. Propinsi Sumatera Selatan	22.000.000	21.873.200	99,42 %
007731. Propinsi Kep. Bangka Belitung	38.000.000	37.984.300	99,96 %
007732. Propinsi Banten	16.000.000	15.986.200	99,91 %
007733. Propinsi Kalimantan Utara	20.000.000	19.740.000	98,70 %
007734. Propinsi Kalimantan Timur	24.000.000	23.250.000	96,88 %
007735. Propinsi Kalimantan Barat	16.000.000	15.938.300	99,61 %
007737. Propinsi Sulawesi Selatan	40.000.000	39.315.000	98,29 %
007738. Propinsi Sulawesi Tenggara	40.000.000	39.997.300	99,99 %
007739. Propinsi Sulawesi Barat	10.000.000	9.568.500	95,69 %
007740. Propinsi Bali	40.000.000	39.566.000	98,92 %
007741. Propinsi Jawa Tengah	26.000.000	25.950.000	99,81 %
007742. Propinsi Jawa Timur	38.000.000	37.989.600	99,97 %
007743. Propinsi NTB	22.000.000	21.920.000	99,64 %
007744. Propinsi D.I.Yogyakarta	22.000.000	22.000.000	100,00 %
053.0C PENGAWALAN PENERAPAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU (PHT) TANAMAN TAHUNAN DAN PENYEGAR	168.000.000	166.955.794	99,38 %
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	168.000.000	166.955.794	99,38 %
008556. tiket	67.725.000	67.445.564	99,59 %
008557. uang harian	26.628.000	26.277.770	98,68 %
008558. Transportasi	25.557.000	25.207.260	98,63 %
008559. Penginapan	48.090.000	48.025.200	99,87 %